

ANALISA

1984—11

NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN BANGSA



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Pande Radja SILALAH

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH
Jusuf WANANDI
Kirdi DIPOYUDO
A. Sudiharto DJIWANDONO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
J. Soedjati DJIWANDONO
Ronald NANGOI

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAH
Ronald NANGOI

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang 111/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532 - 35

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta 10160, Telepon 349489

PENGANTAR REDAKSI	833
PEMANTAPAN PENGERTIAN NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN BANGSA	
<i>Soepardjo ROESTAM</i>	835
KEBANGSAAN INDONESIA DI MASA DEPAN	
<i>Sarwono KUSUMAATMADJA</i>	847
INTEGRASI NASIONAL INDONESIA, BEBERAPA CATATAN	
<i>Harsya W. BACHTIAR</i>	853
PERANAN DUNIA USAHA DAN KEWIRASWASTAAN DALAM PEMBENTUKAN BANGSA	
<i>Daoed JOESOEK</i>	861
BEBERAPA BENTUK KONKRET KONTRIBUSI PENGUSAHA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL	
<i>KWIK Kian Gie</i>	867
PENGERTIAN NASIONALISME MENURUT BUNG HATTA	
<i>H. Rosihan ANWAR</i>	878
SOLIDARITAS SOSIAL DAN KETERKAITAN EKONOMI	
<i>Hadi SOESASTRO</i>	882

Pengantar Redaksi

Kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi perjuangan dan pembangunan. Sejarah telah menunjukkan bahwa kebangsaan telah menjiwai dan mengantar pergerakan rakyat Indonesia inencapai kemerdekaan atau mewujudkan kedaulatannya. Kebangsaan pada dasarnya tidak berhenti karena dalam pengertian kebangsaan itu terkandung cita-cita, kehendak yang ingin dicapai. Situasi hidup dan kehidupan kebangsaan dewasa ini menjadi semakin majemuk, bergerak makin cepat dan jangkauannya saling mengait. Dengan demikian semakin terasa bahwa konsep kebangsaan perlu dihayati secara dinamis dan kreatif.

Pada tanggal 8 November 1984, Yayasan Prasetya Mulya dengan bekerjasama dengan Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia menyelenggarakan diskusi panel dengan tema "Pemantapan Pengertian Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa Dewasa Ini Demi Pengokohan Eksistensi Negara Bangsa." Tujuan diskusi di antaranya adalah memperoleh kejelasan mengenai nasionalisme Indonesia sebagai pancaran dari Pancasila dan UUD 1945; memantapkan peran-serta dunia usaha dalam pembentukan bangsa dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan beranggapan bahwa materi yang dibahas dalam diskusi tersebut sangat penting dalam era pembangunan dewasa ini maka ANALISA kali ini menurunkan makalah-makalah yang disampaikan dalam diskusi panel tersebut dengan ditambah dua buah tulisan yang secara khusus menanggapi hasil diskusi tersebut.

Tulisan pertama adalah sambutan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo ROESTAM. Dalam sambutannya ditekankan antara lain bahwa dalam Pelita IV konsep kebangsaan mempunyai urgensi dan relevansi yang tinggi. Pemahaman, pendalaman, penghayatan dan pengamalan serta menggelorakan semangat kebangsaan itu sangat penting terlebih sesudah menyadari bahwa dalam era pembangunan nasional yang harus kita laksanakan, dunia sarat dengan berbagai macam krisis dan permasalahan. Apabila pembangunan khususnya pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan semangat kebangsaan serta konsep kebangsaan, maka pertumbuhannya tidak akan merusak, sebaliknya bahkan akan mendukung pembangunan bidang-bidang kehidupan kebangsaan lainnya.

Dalam tulisan kedua yang berjudul "Kebangsaan Indonesia di Masa Depan," Sarwono KUSUMAATMADJA, mengemukakan bahwa dewasa ini terdapat semacam kerinduan akan nasionalisme dan gejala ini sehat karena

menunjukkan adanya keinginan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih disegani dan dihormati. Selanjutnya dikemukakan bahwa pemupukan rasa solidaritas merupakan tugas yang sangat penting untuk dilaksanakan dan untuk menciptakannya dibutuhkan pengorbanan secara tulus dan ikhlas.

Bangsa Indonesia akan dihormati dan disegani bila integrasi nasional dapat terpelihara dengan baik. Sehubungan dengan ini Harsya W. BACHTIAR dalam tulisannya yang berjudul "Integrasi Nasional Indonesia" menganalisa hal yang menyangkut integrasi nasional Indonesia melalui pendalaman pengertian dan pandangan. Pendalaman pengertian merupakan hal penting karena perbedaan pengertian tentu dapat menyebabkan perbedaan kebijaksanaan. Untuk memberi gambaran pengertian mana yang lebih cocok di Indonesia, secara terperinci penulis menguraikannya dengan menunjukkan fakta sejarah.

Dalam pembentukan bangsa, dunia usaha dan kewiraswastaan mempunyai tempat yang strategis dan penting. Hal ini dikemukakan oleh Daoed JOESOEF dalam tulisannya yang berjudul "Peranan Dunia Usaha dan Kewiraswastaan dalam Pembentukan Bangsa." Selanjutnya penulis mengupas bagaimana seharusnya dunia usaha dan kewiraswastaan memainkan peranannya dalam pergaulan hidup antar bangsa khususnya dalam pergaulan hidup ekonomi yang sekarang ini telah nyata bertumpu kepada ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat. Kemudian, secara khusus KWIK Kian Gie dalam tulisannya yang berjudul "Beberapa Bentuk Konkret Kontribusi Pengusaha dalam Pembangunan Nasional" mengemukakan beberapa langkah konkret yang mungkin dilakukan oleh dunia usaha dalam usaha memperkuat kesatuan bangsa. Usul yang dikemukakan didasarkan suatu analisa, falsafah bangsa, pandangan yang hidup di masyarakat, dan kondisi dunia usaha.

Dua buah tulisan terakhir, yaitu tulisan dari H. Rosihan ANWAR yang berjudul "Pengertian Nasionalisme Menurut Bung Hatta" dan tulisan Hadi SOESASTRO yang berjudul "Solidaritas Sosial dan Keterkaitan Ekonomi" dibuat untuk menanggapi diskusi ini sehingga dianggap sangat penting dan perlu untuk dikemukakan. Dalam tulisannya H. Rosihan Anwar mengemukakan bahwa pemikiran Bung Hatta tentang Kebangsaan belum kehilangan aktualitas dan relevansinya sehingga perlu untuk diingat. Sedang Hadi SOESASTRO mengemukakan kesenjangan sosial ekonomi tidak selalu harus menimbulkan konflik. Dalam masa sekarang, bagaimana menciptakan keadaan seperti ini tentu sangat penting. Karena sulit disangkal bahwa usaha pemerataan hasil pembangunan membutuhkan waktu dan mempersyaratkan adanya mekanisme yang tepat atau perlengkapan yang memadai.

Pemantapan Pengertian Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa Dewasa Ini demi Penguatan Eksistensi Negara Bangsa*

PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini, untuk bersama-sama membahas masalah-masalah penting yang dihadapi oleh bangsa kita.

Selanjutnya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada segenap anggota keluarga besar Yayasan Prasetya Mulya yang dalam rangka peresmian gedung Yayasan Prasetya Mulya mengadakan diskusi panel pada hari ini, bersama dengan Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia. Berdirinya gedung ini kiranya merupakan manifestasi cita-cita luhur para pembentuk serta pengagas Yayasan Prasetya Mulya.

Berkaitan dengan itu, saya menyambut baik diselenggarakannya diskusi panel ini, walaupun diskusi ini dilaksanakan selama satu hari. Sambutan baik saya itu bukanlah tanpa alasan. Untuk itu perkenankanlah saya menyampaikan beberapa uraian dan pemikiran-pemikiran yang saya harapkan dapat menjadi bahan bagi diskusi ini maupun bagi pemikiran-pemikiran dan tindak lanjut di kemudian hari nanti.

Dari tema diskusi ini saya melihat ada dua materi yang menjadi perhatian: Pertama, tentang kehidupan kebangsaan kita; dan kedua, tentang peranan dunia usaha di dalam kehidupan kebangsaan kita.

*Sambutan Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam pada Diskusi Panel tentang "Pemantapan Pengertian Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa Dewasa Ini demi Penguatan Eksistensi Negara Bangsa," yang diselenggarakan oleh Yayasan Prasetya Mulya dan Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia, Jakarta, 8 November 1984.

Dikembangkannya dua materi ini dalam suatu diskusi menunjukkan adanya kesadaran bahwa dunia usaha di Indonesia merupakan bagian dari kehidupan kebangsaan kita. Lebih dari itu hal ini menunjukkan pula terdapatnya keinginan untuk menegaskan partisipasi dan sumbangan para pengusaha di dalam tugas pengembangan bangsa kita. Hal ini membawa suatu konsekuensi yang amat penting, yakni bahwa segala sesuatunya itu harus kita laksanakan dengan menghayati dan mengamalkan semangat, cita-cita serta paham kebangsaan kita.

Mendalami makna dari konsep kebangsaan kita itu akan membantu kita mengenali diri kita dan menjawab pertanyaan mengenai siapakah kita bangsa Indonesia ini. Definisi diri semacam ini amat penting, dan akan membantu memperjelas tempat, peranan, tugas maupun pengabdian kita masing-masing. Untuk itulah maka saya ingin memulai uraian saya dengan mengajak saudara-saudara peserta diskusi ini menelusuri pertumbuhan konsep kebangsaan kita dan mendalami maknanya.

CITA-CITA KEBANGSAAN KITA

Kebangsaan merupakan hal yang amat fundamental bagi perjuangan kita, dan karena itu juga merupakan hal yang fundamental bagi pembangunan kita. Kebangsaan itu telah menjiwai dan mengantar pergerakan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Kebangsaan itulah yang mengantar rakyat Indonesia mewujudkan kedaulatannya.

Di sekitar awal pertama abad ke-20 ini terjadilah peristiwa penting di dalam sejarah kita, yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan tersebut dipacu oleh berbagai faktor, didorong oleh berbagai aspirasi, didukung oleh berbagai motivasi. Pada awalnya gerakan tersebut menggejala sebagai gerakan yang majemuk dan terpisah-pisah. Namun di dalam perkembangannya gerakan yang majemuk dan terpisah-pisah itu menemukan titik temu mendasar yang makin lama makin menyatukan. Di dalam perkembangan sejarah itu kebhinnekaan berpadu dengan ketunggalikaan. Dan konsep kebangsaan merupakan dinamika batin yang amat menentukan. Setapak demi setapak akan tetapi semakin jelas dan semakin tegas semangat dan cita-cita kebangsaan membentuk pertumbuhan kebangkitan nasional.

Pada tahun 1928 dinamika kebangsaan itu terungkap menjadi makin jelas dalam bentuk Sumpah Pemuda, di mana diikrarkan cita-cita satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.

Walaupun mengalami pasang-surut sebagai akibat dari berkembangnya bermacam-macam aliran, aspirasi dan ideologi yang mempengaruhi sejarah

perjuangan rakyat Indonesia, akan tetapi kebangsaan itulah yang akhirnya mengantarkan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan kita di dalam pernyataan yang berbunyi: Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi telah melahirkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu, merdeka dan berdaulat. Dan proklamasi itu pun segera disusul dengan dibentuknya Konstitusi Negara Kebangsaan, yang didasarkan atas satu Ideologi Kebangsaan yaitu Pancasila.

Keseluruhan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Batang Tubuh dan Penjelasannya pada hakikatnya telah dijiwai oleh konsepsi kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Undang-Undang Dasar itu maka konsepsi kebangsaan menemukan wujudnya yang formal dan konstitusional.

Demikianlah maka terdapat suatu jalur kontinuitas dinamika kebangsaan, yang terungkap di dalam Sumpah Pemuda dan yang menggelora di dalam lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang mewujudkan di dalam Pancasila dasar negara, pandangan hidup dan ideologi nasional, sebagai satu-satunya asas di dalam hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Konsep kebangsaan adalah konsep dinamis, sebab kebangsaan itu adalah dinamika. Kebangsaan itu pun tidak berhenti dengan dinyatakannya proklamasi kemerdekaan serta disusunnya konstitusi dan ideologi kita itu. Kebangsaan itu tetap menjiwai dan mengantar rakyat Indonesia menghadapi berbagai rintangan dan cobaan sejarahnya, baik yang berbentuk agresi penjajah, pertikaian politik dan ideologi yang berlarut-larut maupun infiltrasi dan subversi dari berbagai kekuatan baik dari dalam maupun dari luar. Berdasarkan pengalaman sejarah itu Orde Baru telah sampai kepada suatu kesimpulan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang pada hakikatnya juga berarti tekad untuk menghayati dan mengamalkan konsep kebangsaan kita itu secara murni dan konsekuen.

Dengan tekad yang demikian Orde Baru telah berhasil merintis jaman pembangunan di dalam sejarah kita. Fase demi fase telah dilalui, Pelita demi Pelita dilaksanakan, dan pembangunan itu pun tidak lain daripada usaha mengisi kemerdekaan kebangsaan kita, membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan cita-cita kebangsaan kita. Karena itulah maka pembangunan itu kita nyatakan sebagai pengamalan Pancasila. Pembangunan harus kita laksanakan berdasarkan kepada sikap kebangsaan, cara berpikir kebangsaan dan cara kerja kebangsaan kita.

Marilah selanjutnya kita selami dan kita telusuri makna, isi dan substansi dari konsep kebangsaan kita.

Pertama-tama ingin saya kemukakan bahwa walaupun nasionalisme yang tumbuh di Barat merupakan salah satu faktor yang memacu tumbuhnya paham kebangsaan kita, akan tetapi pertumbuhan sejarah menunjukkan bahwa konsep kebangsaan kita itu tidak sepenuhnya sama dengan konsep nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di Barat. Itulah sebabnya mengapa istilah kebangsaan seyogyanya lebih kita pertahankan, karena istilah kebangsaan itu adalah istilah dari bahasa kita sendiri, di samping itu juga menunjukkan bahwa kebangsaan kita tidak sepenuhnya sama dengan paham nasionalisme yang tumbuh di tempat lain.

Paham kebangsaan kita itu tumbuh sebagai identitas diri dari perjuangan rakyat Indonesia, yang sifat dan coraknya majemuk, identitas yang mampu membentuk perjuangan rakyat itu menjadi perjuangan Bhinneka Tunggal Ika.

Maka itu konsep kebangsaan kita telah tumbuh sebagai suatu konsepsi perjuangan yang mengatasi paham golongan dan perorangan, yang menyatukan. Karena itu konsep kebangsaan tersebut menolak segala bentuk diskriminasi, baik itu karena faktor daerah, asal-usul, keturunan ataupun kedudukan, kemampuan sosial ataupun ekonomi, agama ataupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya maka konsep kebangsaan kita sama sekali tidak dilandaskan kepada konotasi *etnisitas*. Adalah suatu kesalahan yang besar apabila kita menghayati dan mengamalkan cita-cita dan semangat kebangsaan kita dengan melandaskan kepada pengertian etnik. Adalah suatu kesalahan besar apabila di dalam menghayati dan mengamalkan kebangsaan itu baik langsung ataupun tidak langsung, baik sadar ataupun tidak sadar terkandung sikap diskriminatif dalam berbagai bidang dan berbagai bentuk. Itulah sebabnya maka konsep kebangsaan kita itu tidak menerima secara konsepsional pengertian mayoritas dan minoritas, pengertian tentang adanya warga negara kelas satu dan warga negara kelas dua. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Maka dari itu pernah saya kemukakan bahwa naskah proklamasi yang ditandatangani oleh proklamator-proklamator, Bung Karno dan Bung Hatta, dilakukan atas nama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia; beliau-beliau tidaklah mewakili suku Jawa dan Minang. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan kebangsaan: dari bangsa Indonesia, oleh bangsa Indonesia dan untuk bangsa Indonesia. Pembangunan yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan itu pun juga pembangunan kebangsaan: dari bangsa Indonesia, oleh bangsa Indonesia, untuk bangsa Indonesia, dan karenanya pembangunan itu kita pandang sebagai pengamalan Pancasila serta dilaksanakan dalam satu Wawasan Nusantara, di mana kita memandang Indonesia ini sebagai satu kesatuan

politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan pertahanan keamanan, dilandasi jiwa persatuan kebangsaan kita.

REPELITA IV

Di dalam langkah awal memasuki Repelita IV ini konsep kebangsaan itu mempunyai urgensi dan relevansi yang amat tinggi. Itulah salah satu sebabnya mengapa saya dengan kesungguhan hati menyambut baik diskusi panel kebangsaan hari ini, dan saya sambut baik pula segala usaha memahami, mendalami, menghayati, mengamalkan serta menggelorakan semangat kebangsaan itu.

Kita perlu bersyukur karena hasil-hasil yang telah dicapai selama Repelita I, II dan III telah mengantarkan kita bangsa Indonesia untuk dapat melakukan perakitan kerangka landasan pembangunan nasional yang dimulai di dalam periode Repelita IV ini untuk selanjutnya disempurnakan lagi di dalam masa Repelita V yang akan datang nanti. Kita berharap bahwa semuanya itu akan membuat kita bangsa Indonesia menjadi mampu untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan kita sendiri, membangun kehidupan sejahtera sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Berkaitan dengan tahap meletakkan kerangka landasan itu maka MPR menegaskan hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yang berarti bahwa pembangunan itu dilaksanakan dengan dasar sikap kebangsaan, cara berpikir kebangsaan maupun cara kerja kebangsaan, karena Pancasila adalah dasar negara kebangsaan dan ideologi kebangsaan kita pula. Kebangsaan adalah landasan dari kerangka landasan yang akan kita wujudkan. Kita, dalam masa Repelita IV ini, akan mulai meletakkan kerangka pembangunan ideologi kebangsaan. Kita mulai meletakkan kerangka landasan pembangunan politik kebangsaan, ekonomi kebangsaan, sistem sosial budaya kebangsaan, dan membuat kebangsaan kita sebagai dasarnya pertahanan keamanan negara kita.

Perakitan kerangka landasan pembangunan itu memang amat penting karena kita menjadi semakin terkait pula dengan perkembangan dunia, termasuk pergumulan dan percaturan di dalamnya. Tugas sejarah kita tidak akan menjadi makin ringan, akan tetapi akan menjadi semakin kompleks dan makin keras pula. Pembangunan nasional masih harus kita laksanakan di dalam situasi dunia yang tidak menentu, sarat dengan berbagai macam krisis dan permasalahan, dihantui oleh konflik dan peperangan. Di tengah dunia yang seperti itu kita harus tetap berpegang kepada konsep kebangsaan kita. Kebangsaan kita memang bukanlah konsep kebangsaan yang sempit dan tertutup. Namun kebangsaan kita juga memberikan identitas diri kita sebagai

bangsa yang bersatu, merdeka dan berdaulat. Di dalam percaturan dunia seperti itu kita tidak dapat menjual diri kita, kita tidak pula dapat menutup diri kita. Kita harus berusaha menjadi mandiri, dan itu hanya dapat kita jangkau dengan menghayati konsep kebangsaan kita tersebut secara murni dan konsekuen, kreatif dan produktif.

Situasi hidup dan kehidupan kebangsaan maupun dunia ini akan menjadi makin majemuk, bergerak makin cepat dan jangkauannya saling mengait. Namun demikian kita perlu menyadari bahwa di dalam perkembangan dunia ini apa yang dinamakan kekuatan ekonomi merupakan faktor yang amat menentukan, berdampingan dengan kekuatan pengetahuan dan teknologi. Sudah barang tentu bahwa kemandirian kita sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat itu harus pula didukung oleh kekuatan ekonomi kebangsaan yang tangguh pula: kekuatan ekonomi yang mempunyai kualitas tinggi, akan tetapi tetap dilandasi oleh sikap kebangsaan, cara berpikir kebangsaan dan cara kerja kebangsaan dalam gerak dan usahanya baik ke luar maupun ke dalam. Maka memang sekaranglah saatnya kita harus membangun kekuatan ekonomi seperti itu, sebagai bagian yang penting dari pembangunan nasional kita. Apabila pembangunan ekonomi itu dilaksanakan dalam semangat serta konsep kebangsaan, maka pertumbuhannya tidak akan merusak, sebaliknya bahkan akan mendukung pembangunan bidang-bidang kehidupan kebangsaan lainnya.

Sehubungan dengan itu semua, maka saya menginginkan agar kita betul-betul berusaha mendalami makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu, untuk selanjutnya menjabarkannya di dalam wujud satu sistem ekonomi nasional, ekonomi kebangsaan, yang dibangun berdasarkan semangat kekeluargaan, dijiwai oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila, diselenggarakan dalam lingkup Wawasan Nusantara.

Sistem ekonomi kebangsaan disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan adalah suatu tata ekonomi di mana *keterkaitan* dan *keterpaduan* diperhitungkan *sebagai faktor*. Itulah sebabnya maka di dalam sistem itu kita menolak baik etatisme maupun free fight liberalism. Itulah sebabnya maka di dalam sistem ini kita mengembangkan secara terkait dan terpadu tiga kekuatan ekonomi nasional kita yaitu sektor negara, sektor masyarakat dan sektor swasta. Implikasi-implikasi operatif dari pemikiran dasar ini kiranya perlu ditekuni lebih lanjut dan lebih mendalam dengan memperbandingkannya dengan paham-paham di luar sistem kebangsaan kita, untuk diambil hikmah dan pelajarannya: kita tolak yang tidak sesuai, kita terapkan yang dapat memperkaya dan memperkuat kehidupan kebangsaan kita. Dengan memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan itu dapatlah diletakkan kerangka landasan pembangunan tata ekonomi kebangsaan kita.

PEMBANGUNAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Kebangsaan adalah jiwa dan perekatnya kerangka landasan pembangunan nasional kita. Untuk itulah maka pemerintah amat memperhatikan pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan krida ke-3 dari Pancakrida, pemerintah berusaha untuk makin meningkatkan pembangunan bidang ideologi dengan makin memasyarakatkan P-4 dan Demokrasi Pancasila dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa itu. Konsep kebangsaan yang harus dihayati secara dinamis dan kreatif itu harus didukung dengan pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa secara terus-menerus.

Masyarakat kita adalah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Paham kebangsaan kita adalah suatu konsepsi yang memberi kemungkinan paling baik bagi masyarakat seperti itu untuk mengalami perkembangan dan kesejahteraan dengan sebaik-baiknya. Memang, di dalam masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika seperti itu, ada terkandung elemen-elemen kebhinnekaan yang mempunyai potensi untuk berkembang menjadi kekuatan disintegratif. Memang, sebaliknya kita pun tidak dapat menetapkan suatu ketunggalikaan yang mematikan kebhinnekaan. Kita juga tidak dapat memaksakan salah satu faktor kebhinnekaan saja untuk menjadi acuan normatif bagi kehidupan seluruh bangsa dan negara kita ini.

Problematis Bhinneka Tunggal Ika itu akan menjadi makin menggawat disebabkan karena pembangunan telah menghasilkan kemajuan-kemajuan, dan kemajuan itu selanjutnya akan membawa kehidupan bangsa kita memasuki fase diversifikasi. Diversifikasi itu tidak dapat kita elakkan, akan tetapi perlu kita bangun agar tidak menjadi faktor yang mengacaulaukan kehidupan bangsa kita. Semua itu adalah tuntutan proses demokrasi kita, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa tidaklah dimaksudkan sebagai pembangunan yang sifatnya membekukan, sebaliknya pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa itu dimaksudkan untuk menciptakan ruang gerak yang bahagia dan sejahtera bersama.

Sebagai jiwa dan perekat pembangunan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa itu dengan sendirinya menyentuh berbagai bidang kehidupan kebangsaan kita: ideologinya, politiknya, ekonominya, kehidupan sosial budayanya maupun pola pertahanan keamanan negaranya. Sebagai jiwa dan perekat pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam Wawasan Nusantara, persatuan dan kesatuan bangsa itu pun harus menjangkau segenap rakyat di seluruh tumpah darah kita ini.

Di dalam kerangka itulah maka pembauran menempati posisi yang amat penting. Pembauran itu adalah proses fungsional di dalam pembangunan per-

satuan dan kesatuan bangsa tersebut. Pembauran itu mempunyai jangkauan yang amat luas, namun salah satu masalah yang kita rasa penting adalah pembauran yang menyangkut warga negara keturunan.

Proses pembauran itu menjadi penting oleh karena kita sudah bertekad menghayati konsep kebangsaan yang tidak menerima segala bentuk diskriminasi dan tidak didasarkan kepada konotasi etnis. Proses pembauran itu penting karena kita bermaksud membangun masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Proses pembauran itu penting karena kehidupan kebangsaan itu telah kita tuangkan ke dalam bentuk negara kebangsaan, dengan konstitusi kebangsaan maupun ideologi kebangsaan. Dengan demikian problematik pembauran tersebut tidak tumbuh dari ideologi dan konstitusi kita. Problem pembauran itu lebih merupakan problematik sejarah, problem psikologis dan sosiologis.

Dari sejarah kolonial kita mencatat bahwa dalam rangka melaksanakan sistem penjajahannya di bumi Indonesia ini, Pemerintah Hindia Belanda telah mengadakan pemisahan yang dogmatik struktural antara orang-orang Cina dan orang-orang pribumi. Pemisahan yang dogmatik struktural tersebut diberi kekuatan hukum dan meliputi segala bidang kehidupan: dari lahir hingga akhir hayatnya masing-masing. Secara dogmatik struktural terjadi pemisahan antara orang-orang Cina dan pribumi di dalam sistem hukumnya, di dalam pemukimannya, di dalam kegiatan kehidupannya, di dalam bidang ekonomi, dan di bidang pendidikannya. Warisan kolonial inilah kiranya yang harus kita tinggalkan. Pada kesempatan ini, sebagai Menteri Dalam Negeri, yang mempunyai tugas membangun persatuan dan kesatuan bangsa itu, perkenankanlah saya menyampaikan seruan kepada para peserta diskusi ini, kepada segenap lapisan masyarakat dan seluruh jajaran Departemen Dalam Negeri, untuk menyadari kenyataan itu, dan membangun sikap baru: meninggalkan dan menanggalkan warisan kolonial seperti itu, dan mulai mengenakan sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan semangat dan cita-cita kebangsaan kita. Kemerdekaan kebangsaan yang sudah dicapai hendaknya diwujudkan dengan disingkirkannya segala bentuk diskriminasi, untuk digantikan dengan semangat persatuan dan kesatuan, baik di dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, kebudayaan serta hukum.

Pola dogmatik struktural yang dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial itu telah menumbuhkan sikap dan perilaku psikologis yang penuh kecurigaan, saling asing-mengasingkan yang satu dengan yang lain, menjadi makin jauh dalam jarak maupun perasaan, yang kesemuanya itu mempersukar tumbuhnya rasa solidaritas bersama. Dan semua ini berlaku di dalam lingkungan yang secara sosiologis majemuk di dalam masing-masing golongan, di dalam masing-masing kelompok.

Segalanya itu merupakan latar belakang mengapa kemudian sampai dengan hari ini kita dihadapkan kepada masalah-masalah yang kadang-

kadang pelik dan kadang-kadang merupakan sumber SARA yang setiap kali tampil di permukaan kehidupan masyarakat kita.

Itulah sebabnya maka walaupun konsep kebangsaan kita tidak mengenal bentuk-bentuk diskriminasi, tidak mengenal mayoritas-minoritas, tidak dilandasi oleh konotasi etnis, berkali-kali kita mengalami sikap serta tindakan yang rasialistis, menumbuhkan perasaan dan pengertian perbedaan antara "pribumi" dan "nonpribumi," antara asing dan asli. Masih lagi semua itu tidak jarang terkait dengan kenyataan bahwa sebagian besar keturunan Cina itu hidup dari sektor ekonomi, maka tiupan isu pribumi dan nonpribumi itu langsung saja dikaitkan dengan letupan isu kaya-miskin, walaupun dalam kenyataannya tidak semua keturunan Cina itu adalah kaya dan tidak semua yang lainnya adalah miskin, tidak semua keturunan Cina adalah berekonomi kuat dan tidak semua lainnya itu berekonomi lemah.

Itulah masalah besar yang harus ditangani, dan untuk itu Departemen Dalam Negeri akan mengembangkan apa yang telah dirintis sampai saat ini, yaitu Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB), yang saya harapkan akan dapat menjadi salah satu partner dari Departemen Dalam Negeri di dalam menjalankan tugas dan usahanya membangun persatuan bangsa itu.

BIDANG USAHA

Walaupun pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa itu sifatnya menyeluruh dan terpadu, akan tetapi perlu saya kemukakan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa di bidang ekonomi adalah amat penting.

Pertama, perlu saya kemukakan lagi bahwa yang ingin kita bangun saat ini adalah kerangka landasan tata ekonomi kebangsaan, sebagai bagian dari kerangka landasan kehidupan kebangsaan kita. Ini berarti banyak pemikiran dan usaha perlu dicurahkan untuk mendalami dan seterusnya menjabarkan kerangka landasan tata ekonomi kebangsaan itu.

Kedua, ingin saya kemukakan pula bahwa sebagai akibat politik pecah-belah Pemerintah Kolonial, maka telah tercipta suatu pemisahan dogmatik struktural antara golongan keturunan Cina di satu pihak dan golongan di luar itu di lain pihak, khususnya yang menemukan manifestasinya di bidang ekonomi, terutama dunia usaha. Kenyataan yang bersumber dari sejarah masa lampau itu mempunyai ekor yang menimbulkan problem sosiologis dan psikologis, yang tidak jarang menjadi sumber kerawanan di dalam kehidupan bangsa dan negara kita ini.

Ketiga, menyadari bahwa kita semakin terkait dengan perkembangan dunia di mana kekuatan ekonomi merupakan faktor yang amat penting, maka tidak ada pilihan lain lagi bahwa kita melaksanakan konsolidasi kekuatan-kekuatan ekonomi kebangsaan, baik konsolidasi idiil, konsolidasi wawasan maupun konsolidasi di tingkat pelaksanaannya.

Kita tidak boleh membiarkan permasalahan menjadi makin berlarut. Tantangan yang kita hadapi akan makin banyak dan makin berat, baik di bidang pembangunan nasional maupun dalam kaitannya dengan perkembangan dunia. Kita masih akan dihadapkan kepada masalah-masalah kependudukan, ketenagakerjaan, kesenjangan kaya-miskin serta problem pendidikan masyarakat. Kita masih akan dihadapkan kepada situasi ekonomi dunia yang belum menentu. Semuanya itu harus kita hadapi dengan dipegangnya konsepsi ekonomi kebangsaan yang jelas serta dengan rapatnya barisan kekuatan ekonomi kebangsaan itu pula.

Memang harus diakui bahwa walaupun banyak masalah dan hambatan yang berulang kali terjadi, bahkan bagaikan menahun kita alami, akan tetapi kita juga perlu mencatat beberapa hasil di dalam usaha menggalang pembauran di bidang usaha ini, yang dapat kita pegang sebagai modal bagi langkah-langkah lebih lanjut.

Pendalaman-pendalaman yang makin memperjelas makna pasal 33 UUD 1945 serta dengan penjabarannya yang dilaksanakan di dalam Repelita-Repelita kiranya merupakan sumber pengalaman yang amat penting. Di dalam pengalaman tersebut kita perlu berpegang kepada asas kesinambungan, perencanaan, peningkatan dan penyempurnaan. Pengalaman-pengalaman menunjukkan arah yang jelas, seperti halnya kita telah memetik banyak pelajaran dari pengalaman sejarah politik kebangsaan kita untuk pembangunan bidang politik kita.

Pertumbuhan tiga sektor ekonomi nasional kita ternyata telah pula menunjukkan betapa perlunya keterkaitan dan keterpaduan. Perkembangan itu mengungkapkan makna semangat kekeluargaan, bahwa persatuan lebih bermanfaat daripada perpecahan, bahwa kerjasama lebih menguntungkan daripada ketertutupan. Kesadaran seperti itu telah pula tumbuh di kalangan para pengusaha.

Di dalam dunia usaha swasta memang terdapat beberapa kelompok usaha, yang lazim digolongkan ke dalam kelompok pengusaha kuat, pengusaha menengah dan pengusaha lemah. Pengalaman telah membangkitkan kesadaran bahwa haruslah ada keseimbangan serta dengan keterkaitan yang komplementer dan saling mengisi antara yang satu dan yang lain.

Sebagai suatu langkah maju yang perlu dicatat kiranya adalah upaya Kadin yang dalam Temu Wicaranya telah sampai kepada Pernyataan Tekad Kerjasama dan Kesepakatan Pengusaha Nasional, di mana antara lain dinyatakan bahwa para pengusaha bertekad tanpa membedakan keturunan, pribumi dan nonpribumi, kesukuan, asal-usul, status sosial, daerah maupun agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akan berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional mencapai tujuan nasional yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semua ini merupakan ungkapan kesadaran awal tumbuhnya kekuatan ekonomi kita sebagai kekuatan ekonomi kebangsaan kita.

Kesadaran itu pun telah diikuti dengan tindak lanjut dalam bentuk memikirkan maupun mengusahakan wujud dari kerjasama seperti itu, baik yang berkaitan dengan permodalannya, keterampilannya, pengalaman manajerialnya maupun pendidikannya. Semua itu masih perlu ditingkatkan terus. Tumbuhnya jajaran dunia usaha menjadi jajaran ekonomi kebangsaan yang kreatif dan dinamis tentulah merupakan komponen yang amat penting bagi terwujudnya kerangka landasan bagi pembangunan dalam wawasan dan gerakan kebangsaan.

PENUTUP

Kiranya semua itu cukup menunjukkan betapa diskusi ini merupakan salah satu momentum di dalam gerak dan tumbuhnya kekuatan ekonomi kebangsaan kita itu. Kiranya menjadi jelas pula bahwa sambutan saya terhadap diskusi ini memang tidaklah tanpa alasan.

Saya harapkan diskusi ini sekurang-kurangnya akan dapat membangkitkan motivasi dan mengadakan inventarisasi dan sistematisasi dari pemikiran-pemikiran positif yang telah tumbuh dan berkembang sampai saat ini, mengadakan deteksi permasalahan, serta memberikan baik usaha pendalaman maupun tindak lanjut yang semakin nyata.

Saya tahu bahwa Yayasan Prasetya Mulya merupakan salah satu perintis di dalam perkembangan yang menggembirakan ini. Saya tahu pula bahwa semangat dan cita-cita itu pula yang telah melahirkan IMPM ini. Harapan saya semoga IMPM ini baik langsung maupun tidak langsung akan menjadi pusat bangkitnya jajaran ekonomi kebangsaan kita, pada saat kita ingin menetapkan kerangka landasan ini maupun di masa yang akan datang nanti. Tidaklah berlebihan apabila IMPM menjadi salah satu tempat pendidikan dan kaderisasi dari kekuatan ekonomi kebangsaan kita.

Saya juga amat menghargai Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia, yang bersama dengan Yayasan Prasetya Mulya memprakarsai diskusi panel yang penting ini. Kenyataan ini menunjukkan betapa Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia sungguh menghayati semangat kebangsaan serta tanggap akan tantangan besar yang harus diselesaikan oleh bangsa kita.

Dengan semangat seperti itu saya harapkan diskusi ini dilaksanakan. Dengan semangat seperti itu pula saya harap usaha ini terus dilanjutkan. Untuk itu perkenankanlah saya menyatakan diskusi ini dimulai.

Kebangsaan Indonesia di Masa Depan

Sarwono KUSUMAATMADJA*

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang tiada henti untuk mencapai cita-cita bersama bangsa. Dalam masa Orde Baru usaha untuk mencapai cita-cita bangsa itu telah dituangkan dalam berbagai keputusan politik yang saling berkait satu dengan lainnya sehingga bagi siapa pun akan jelas bahwa Orde Baru menganut sistem tertentu dalam mencapai cita-cita bangsa itu. Dokumen yang secara komprehensif memuat rencana bangsa adalah GBHN, yang merupakan pencerminan dari kehendak kita semua, dan dirumuskan secara demokratis konstitusional. Jika kita rajin mengikuti proses terbentuknya GBHN maka kita pun segera sadar bahwa cita-cita bangsa hanya dapat terwujud melalui proses politik. Proses politik tersebut setidaknya menunjukkan dua variabel besar. Katakanlah satu variabel tetap yang kita namakan falsafah dan konstitusi bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945. Variabel lain adalah variabel yang senantiasa bersifat dinamis dan penuh perubahan yaitu masyarakat bangsa itu sendiri. Jika keduanya dipadukan dalam suatu pengertian umum serta diletakkan dalam konteks pembangunan nasional, maka dapatlah dikatakan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha untuk mengendalikan perubahan masyarakat sehingga terdapat kemajuan-kemajuan yang dikehendaki dalam suatu kesinambungan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam keseluruhan UUD 1945, baik Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasannya. Dengan perkataan lain melalui proses pembangunan nasional kita menghendaki agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh bangsa adalah dalam rangka mencapai kondisi-kondisi di segala bidang sehingga dengan berjalannya waktu cita-cita bangsa akan makin lama makin nyata tampak.

*Sekjen Golkar.

Oleh karena itu maka setiap bahasan mengenai masa depan bangsa tidak akan terlepas dari dua pokok besar, yaitu pertama, penegasan mengenai konsep dasar kebangsaan kita yang tidak lain adalah Pancasila dan UUD 1945, serta yang kedua, adalah persepsi tentang perubahan-perubahan yang akan timbul dan yang ingin ditimbulkan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa itu. Persepsi yang tepat mengenai kedua pokok besar tadi adalah esensial karena tanpa adanya persepsi yang jelas maka berbagai masalah besar dapat timbul, yang akan menyebabkan bangsa kita kehilangan orientasi. Dalam keadaan di mana orientasi tidak jelas, maka akan timbul satu situasi di mana masalah demi masalah yang muncul, baik yang diperkirakan maupun tidak, diselesaikan secara sepotong-sepotong dengan hanya memperhitungkan manfaat-manfaat sesaat dan sepihak sehingga akhirnya terdapat suatu kondisi yang kita tidak inginkan yaitu terlupakannya fakta sejarah bahwa sebenarnya bangsa Indonesia mempunyai variabel tetap dalam dirinya, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Kondisi sedemikian amat berbahaya karena bangsa yang membangun tanpa kesadaran akan cita-citanya, dan tanpa kemampuan untuk mewujudkan cita-cita itu dalam perbuatannya akan pasti berantakan. Sebaliknya bangsa yang sanggup mewujudkan cita-cita bangsanya secara sadar akan menjadi bangsa yang besar.

Indonesia mempunyai kemampuan untuk menjadi bangsa yang besar karena memenuhi segala prasyarat untuk mencapai hal itu. Dari segi penduduk, Indonesia adalah kelima terbesar di dunia. Kekayaan alam kita boleh dikatakan lengkap dinilai dari potensi bahan-bahan strategis yang kita miliki. Letak geografi Indonesia dengan sendirinya akan meminta peranan internasional yang penting karena berada dalam jalur lalu-lintas dunia yang vital. Seluruh prasyarat itu hanya dapat berarti jika kita dapat mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang bukan hanya cerdas, ulet dan rajin namun juga mempunyai kemauan emotif untuk menjadi bangsa yang besar. Satu hal juga yang patut kita garis bawahi adalah bahwa potensi untuk menjadi bangsa yang besar harus mampu kita wujudkan. Kalau kita tidak melakukannya maka dalam masa yang penuh dengan persaingan ini, dapat dipastikan bahwa kepentingan-kepentingan dunia mana pun akan berusaha menjadikan bangsa Indonesia sebagai semacam bangsa kelas dua. Membiarkan diri kita menjadi bangsa kelas dua sama saja dengan mengingkari amanat para pendiri Republik yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dewasa ini terdapat semacam kerinduan akan nasionalisme. Gejala ini sehat karena menunjukkan adanya keinginan untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih disegani dan dihormati. Namun adalah keliru jika kita menyangka bahwa pembangunan nasional yang kita lakukan selama Orde Baru tidak mencerminkan kehendak untuk mempertinggi taraf kehormatan bangsa. Di masa yang lalu, mungkin karena tingkat kedewasaan bangsa kita

belum memadai dan juga karena masalah-masalah dalam negeri, kita pernah memperlihatkan diri dengan wajah bangsa pemberang. Kepuasan emosional yang didapatkan dari sikap yang demikian itu ternyata tidak membuahkan hasil, karena pada dasarnya sikap berang itu hanyalah upaya menutupi kelemahan-kelemahan politik dalam negeri yang telah menciptakan krisis politik dan ekonomi yang berpuncak pada peristiwa G-30-S/PKI. Sesudah kejadian itu, kita melaksanakan politik luar negeri kita dengan lebih rasional dan bernada rendah tetapi tetap memperlihatkan wajah bangsa yang teguh. Peranan Indonesia yang konstruktif dalam ASEAN adalah salah satu bukti yang nyata. Demikian juga peranan Indonesia dalam kelompok-kelompok negara berkembang merupakan peranan positif dalam rangka menarik perhatian dunia internasional akan ketimpangan-ketimpangan dalam tata hubungan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Kemandirian Indonesia diperlihatkan dalam sikapnya yang prinsipial dan selalu dipegang teguh sejak awal, kendatipun dalam sistem yang berbeda-beda yaitu bahwa kita tidak pernah membiarkan diri kita terikat dalam pakta militer dengan negara mana pun. Sikap-sikap dasar itu penting untuk diingat karena tanpa menyadari hal itu hubungan-hubungan internasional yang kita lakukan dalam rangka pembangunan ekonomi dapat ditafsirkan sebagai politik kapitulasi terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi dunia tertentu. Hubungan ekonomi yang erat dengan beberapa kalangan internasional tertentu, tidak perlu selalu dilihat sebagai penghalang bagi kemandirian bangsa. Karena dalam situasi dunia yang demikian penuh saling ketergantungan, hubungan dengan pihak yang lebih kuat tidak dapat dielakkan. Politik isolasi bukanlah jawaban yang memuaskan dibuktikan oleh kegagalan dari negara-negara yang menganut politik itu dalam meninggikan taraf hidup bangsanya. Sebaliknya kita juga menyaksikan betapa bangsa Jepang, sebagai suatu contoh, yang setelah Perang Dunia Kedua mengalami kehancuran total dapat bangkit sebagai kekuatan ekonomi raksasa yang dalam banyak hal telah melebihi Amerika Serikat yang membantunya bangkit dari kehancuran ekonominya.

Oleh karena itu jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa, harus dilihat dalam diri kita sendiri. Sukses atau tidaknya kita mengurus hubungan luar negeri merupakan cerminan dari usaha-usaha dalam negeri kita. Usaha-usaha dalam negeri harus sukses sehingga hubungan luar negeri akan menunjang harkat martabat bangsa. Usaha-usaha dalam negeri kita yang meliputi seluruh bidang kehidupan bangsa, adalah pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Oleh karena itulah menjadi amat penting, seperti diuraikan di muka, untuk menyatukan persepsi tentang Pancasila. Menyatakan persepsi tentang Pancasila ini amat menentukan konsistensi bangsa dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya.

Dalam rangka penyamaan persepsi tentang Pancasila, kita mau tidak mau harus mengambil pendekatan sejarah. Sejarah bukanlah kumpulan dari mitos

yang didongengkan secara turun-temurun, namun selalu harus didasarkan pada fakta-fakta yang teruji. Dengan demikian sejarah dalam satu segi, mempunyai unsur objektif. Semua fakta sejarah harus dihormati apa adanya. Namun sejarah tidak terlepas dari subjektivitas politik yang selalu berusaha menempatkan fakta-fakta sejarah dalam konteks yang menguntungkan suatu maksud politik tertentu. Dalam keadaan di mana Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional, perdebatan mengenai Pancasila dengan pembuktian sejarah menurut kepentingan politik masing-masing kelompok politik, akan tetap hidup dan merupakan dialog politik yang amat penting. Dari segi kepentingan bangsa secara keseluruhan, sesuai pula dengan hakikat Pancasila sebagai ideologi nasional, maka kita harus selalu berusaha menumbuhkan subjektivitas bangsa secara utuh mengenai Pancasila. Tentunya, subjektivitas ini hanya mempunyai kebenaran sejarah, jika kita mampu membuktikan bahwa Pancasila tumbuh dari perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Bukti-bukti ini dapat kita gali dari perjuangan bangsa dalam melawan kolonialisme yang pada zaman Kebangkitan Nasional memuncak dengan teretusnya Sumpah Pemuda, serta kemudian menumbuhkan pergerakan politik yang bersifat kebangsaan dan memuncak lagi dengan Proklamasi Kemerdekaan serta penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Corak bangsa Indonesia dicerminkan pula oleh motto bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perjalanan selanjutnya ide kebangsaan mengalami pasang-surut karena berlakunya sistem politik yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kendatipun demikian tradisi perjuangan kebangsaan telah cukup tertanam dibuktikan dengan fakta sejarah bahwa setiap puncak krisis politik selalu menyebabkan bangsa kita menegaskan komitmennya terhadap Pancasila dan UUD 1945 itu. Akhirnya pada tahun 1966 bangsa kita mengambil pelajaran sejarah bahwa Pancasila dan UUD 1945 harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Dalam zaman Orde Baru Pancasila dalam penjabarannya muncul melalui gagasan-gagasan nasional yang dirumuskan dalam ketetapan-ketetapan MPR, yaitu P-4 dan GBHN khususnya Wawasan Nusantara. Oleh karena itulah Pancasila sebenarnya adalah ideologi yang tumbuh dari tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dalam persamaan nasib dan cita-cita, sehingga konsep kebangsaan kita tidak berdasarkan persamaan ras, etnik, kedaerahan dan agama. Pada proses selanjutnya Pancasila kemudian melahirkan gagasan nasional yang konsisten. Pemahaman sejarah itu perlu bukan untuk kemudian tenggelam dalam sejarah, namun untuk meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam menyusun masa depan. Pemahaman sejarah yang tidak mencerminkan tekad untuk mengutamakan keutuhan dan persatuan bangsa, akan membawa akibat bahwa semangat pengamalan Pancasila akan menyeleweng dari maksudnya. Kita harus bersikap waspada dan tegas dalam hal ini karena di masa mendatang bukan mustahil kita akan mendengar gagasan-gagasan yang mempunyai latar belakang sejarah yang sepiintas-lalu mungkin terdengar baik namun dapat mempertajam perbedaan-

perbedaan dalam bangsa yang majemuk ini. Kita akan meletakkan kerangka landasan pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa, yang antara lain berarti bahwa gagasan-gagasan kebangsaan kitalah yang nantinya akan merupakan isi dan jiwa dari sistem nasional kita.

Pengalaman politik masa lalu yang mengancam keutuhan bangsa serta menghambat pencapaian taraf hidup rakyat yang lebih baik telah membuahkan stabilitas nasional yang diperlukan sehingga pembangunan nasional secara bertahap dan berencana dimungkinkan atas dasar tekad melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai memang mengagumkan sehingga pembangunan nasional Indonesia merupakan salah satu cerita sukses bagi negara-negara berkembang. Suksesnya pembangunan ini akan membawa persamaan nasib dan cita-cita bangsa Indonesia dalam cakrawala yang lebih luas. Suksesnya pembangunan telah menyelesaikan banyak masalah-masalah dasar yang sebelumnya menjadi persoalan-persoalan yang kronis tidak kunjung selesai, apakah politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dengan taraf kehidupan yang lebih tinggi dewasa ini maka akan timbul tuntutan dan prioritas yang mungkin saja telah dapat diduga maupun belum. Di samping itu, struktur usia manusia Indonesia yang mayoritasnya terdiri dari orang-orang muda akan membawa prospek dan tantangan tersendiri. Prospek karena dengan demikian kita tidak kekurangan tenaga produktif di masa depan, tantangan karena tenaga produktif tersebut jika tidak disalurkan akan merupakan problem sosial yang besar. Orang-orang muda usia ini sebagian besar tumbuh dan berkembang dalam suasana stabil sehingga persepsinya mengenai masalah-masalah keutuhan nasional, stabilitas serta politik pasti akan berbeda dengan generasi terdahulu yang menghadapi konflik fisik maupun politik secara langsung dan terbuka. Oleh karena itu ide persamaan nasib dan cita-cita harus disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan baru yang timbul ini. Pengamalan Pancasila harus dilihat sebagai upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber jawaban bagi masalah-masalah nasional kita di masa depan. Akan tidak memadai lagi jika Pancasila kita kaitkan hanya dengan keutuhan dan persatuan bangsa dalam pengertiannya dahulu yaitu mengatasi perpecahan bangsa semata-mata.

Keutuhan dan persatuan bangsa harus kita satukan pengertiannya dengan lebih terwujudnya rasa senasib dan secita-cita, oleh karena itu harus ditumbuhkan melalui peningkatan solidaritas nasional yang dapat dirasakan gemanya oleh semua orang. Dijadikannya Pancasila sebagai satu-satunya asas harus dilihat dalam pengertian pembinaan solidaritas nasional ini, sehingga di masa-masa mendatang masalah-masalah pembangunan yang bersifat kualitatif serta berbobot sosial budaya harus mendapat perhatian bersama.

Usaha ini melibatkan semua pihak karena mustahil untuk mengharapkan bahwa masalah-masalah nasional kita hanya akan terselesaikan secara politis,

apalagi secara politis dalam pengertian formal. Pembudayaan Pancasila adalah masalah semua orang sehingga masyarakat yang terorganisasi dalam berbagai bentuk kelompok kegiatan maupun spesialisasi mempunyai peranannya dalam pembentukan masyarakat Pancasila, melalui penciptaan pola tingkah laku, cara berorganisasi maupun penyusunan program yang akan memperkuat solidaritas bangsa serta mengatasi perbedaan-perbedaan etnik, ras, status sosial ekonomi maupun agama.

Politik mempunyai peranan besar karena melalui keputusan-keputusan politik dapat diwujudkan jaminan-jaminan objektif, misalnya persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, melalui produk-produk hukum. Namun perlu diingat bahwa produk-produk politik yang mencerminkan suatu idealisme tertentu tidak mungkin terwujud tanpa adanya kekuatan masyarakat yang terorganisasi serta mampu menciptakan iklim sosial yang mencerminkan idealisme tersebut.

Dunia usaha merupakan wahana yang penting dalam mewujudkan iklim ini, karena solidaritas dalam dunia usaha akan cepat terasa manfaatnya oleh banyak pihak. Sebaliknya ketimpangan ekonomi yang antara lain ditandai oleh tumbuhnya kelompok ekonomi yang kuat dan eksklusif, harus dianggap sebagai penghambat terwujudnya solidaritas sosial. Lemahnya solidaritas sosial ini akan menimbulkan masalah keamanan bagi bangsa maupun bagi elit ekonomi yang bersangkutan yang tidak dapat diselesaikan dengan memasang kaca anti-peluru, memelihara anjing herder atau tindakan-tindakan pengamanan lain yang justru menambah potensi konflik yang ada. Tindakan-tindakan kemanusiaan yang tentunya selalu beritikad baik tidak akan mewujudkan iklim solidaritas sosial selama tindakan kemanusiaan ini dikesankan sebagai upaya tanpa memahami konsep sosial budaya serta sosial politik di dalam mana solidaritas sosial ini mempunyai konteksnya. Oleh karena itu dunia usaha ekonomi kuat di Indonesia harus melancarkan usahanya dalam kerangka persamaan nasib dan cita-cita sehingga tidak dapat mengharapkan ketenangan usaha hanya dengan mengandalkan efisiensi usaha saja. Penyelesaian masalah politik dan budaya selalu tidak efisien sehingga pengusaha yang bijak harus selalu tahu kapan harus efisien dan kapan harus tidak efisien. Bayaran yang bisa diharapkan dalam mewujudkan solidaritas sosial adalah perasaan bangga bahwa sebagai bagian bangsa kita mampu menyumbangkan sesuatu yang hanya dapat diukur dengan kepuasan batin serta juga perasaan aman karena merasa berada dalam satu keluarga besar. Perasaan aman ini pada waktunya toh akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda.

Integrasi Nasional Indonesia: Beberapa Catatan

Harsja W. BACHTIAR*

DUA PANDANGAN YANG BERBEDA

Ada paling sedikit 2 pandangan yang berbeda tentang integrasi bangsa Indonesia sekarang ini dan tentu saja masing-masing pandangan ini mengakibatkan juga kebijaksanaan yang berbeda berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan integrasi bangsa.

Pandangan pertama didasarkan atas anggapan bahwa bangsa Indonesia telah ada sejak amat lama, mungkin sudah sejak zaman prasejarah. Dalam masa tertentu terutama dalam masa kerajaan agung Sriwijaya dan Majapahit, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tampak jelas terwujud sebagai satu kesatuan politik yang besar. Akan tetapi kemudian dengan menggunakan cara memecah-belah persatuan besar ini (*divide et impera*) para penjajah asing berhasil menguasai bangsa Indonesia dan memanfaatkan kepulauan yang menjadi tanah jajahannya dengan penduduk taklukannya untuk meningkatkan kemakmuran di tanah asal mereka di Eropa. Sekarang bangsa Indonesia telah berhasil dibebaskan dari kekuasaan penjajah dan dijadikan negara merdeka kembali, Republik Indonesia. Meskipun negara Republik Indonesia tumbuh berkembang menjadi negara yang cukup terkemuka, cukup terhormat di dunia kita ini, penjajahan asing di masa lampau dan berbagai perbedaan politik, dan sebagian disebabkan oleh pengaruh kekuatan-kekuatan asing, mengakibatkan masih adanya berbagai perpecahan politik, pertentangan politik, yang harus dihentikan agar kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dapat dipulihkan kembali.

Pandangan kedua, yang dianut oleh pemrakarsa didasarkan atas anggapan bahwa sebelum permulaan abad XX ini, tidak pernah ada penduduk di ke-

*Kepala BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

pulauan ini yang dapat dinamakan bangsa Indonesia. Malah nama "Indonesia" adalah ciptaan seorang ahli antropologi Inggris bernama J.R. Logan, yang memerlukan suatu nama untuk kepulauan yang terbentang antara Benua Asia dan Australia serta penduduknya yang pada waktu ia menulis karya ilmiah yang menggambarkan penduduk di kepulauan ini tahun 1850, tidak mempunyai nama sendiri. Pada permulaan abad XX ini nama Indonesia belum dikenal oleh penduduk kepulauan kita sendiri. Pada waktu itu hanyalah ada bangsa Jawa, bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Sunda, bangsa Bali, bangsa Bugis dan demikian seterusnya. Gerakan kebangsaan Indonesia mempersatukan bangsa-bangsa di kepulauan kita menjadi satu nation yang besar, satu nation yang agung, bangsa Indonesia. Proses mempersatukan satuan-satuan penduduk yang sebelum ini terpisah-pisah masih berlangsung, sehingga proses inilah yang dimaksud bilamana "integrasi nasional dibicarakan." Pertumbuhan nation Indonesia menjadi nation yang besar, agung dan jaya, adalah suatu keberhasilan yang bisa dibanggakan. Akan tetapi masih banyak orang yang menurut hukum berkewarganegaraan Indonesia, seperti suku-suku bangsa yang masih terasing di pedalaman Irian Barat, dalam kenyataan belum sungguh-sungguh merupakan bagian dari nation Indonesia. Lagipula hubungan antar-golongan yang masih baru masih harus diperkuat agar supaya tidak mudah retak, ataupun malah putus. Pertentangan politik belum tentu mengakibatkan nation Indonesia menjadi lemah. Pertentangan politik bisa mengakibatkan persatuan nation Indonesia menjadi kuat bilamana pertentangan politik yang bersangkutan mempersatukan orang-orang dari berbagai golongan yang jelas berbeda, seperti orang-orang yang berbeda ras, suku bangsa dan agama, dalam menghadapi pihak lain yang juga mempersatukan orang-orang dari golongan-golongan yang berbeda ini.

Kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu; orang-orang yang bekerja dalam bidang ilmu-ilmu sosial tentu cenderung menggunakan suatu sistem teori tertentu yang terdiri dari asumsi-asumsi, konsesi-konsesi serta proposisi-proposisi tertentu yang semestinya berhubungan satu dengan yang lain menurut cara berpikir yang teratur maupun yang merujuk pada kenyataan empirik, kenyataan yang dapat diamati dan digambarkan.

Masalah yang sekarang kita hadapi, masalah integrasi nasional, diwujudkan oleh seperangkat gejala sosial tertentu dalam dunia nyata yang bisa ditanggapi, digambarkan dan dianalisa dengan penggunaan suatu kerangka pemikiran tertentu, suatu sistem teori tertentu.

Konsep dasar dalam menghadapi masalah integrasi bangsa Indonesia adalah konsep "bangsa" atau "nation," dua konsep yang tidak sepenuhnya merujuk pada gejala yang sama. Konsep "bangsa" menurut hemat pemrakarsa, didasarkan atas anggapan bahwa orang-orang yang merupakan kolektiva

sosial yang bersangkutan sudah turun-temurun merupakan satu kolektiva sosial, bahkan mungkin sekali semua mempunyai nenek moyang yang sama, suatu ide yang biasanya diperkuat oleh suatu mitos yang menjelaskan asal mula bangsa yang bersangkutan, biasanya dengan menampilkan seseorang atau sepasang manusia istimewa sebagai asal mula bangsa. Pengertian demikian, yang cenderung menyamakan "bangsa" dengan semacam ras, mempersulit penerimaan orang yang tidak mempunyai nenek moyang yang sama sebagai anggota penuh bangsa yang bersangkutan, terlebih lagi bilamana jelas-jelas nenek moyang mereka adalah bagian dari bangsa lain.

Konsep "nation," sebagaimana dijelaskan oleh Ernest Renan dalam kuliah umumnya di Universitas Sorbonne, Paris, tahun 1882, tidak mengandung kesulitan yang terdapat pada konsep "bangsa," karena nation biasanya malah terjadi dari percampuran, pemersatuan dari berbagai penduduk. Suatu nation tidak didasarkan atas ras tertentu, bahasa tertentu, agama tertentu, kesamaan kepentingan, ataupun batas-batas alamiah yang dapat dilihat pada peta. "Suatu nation ialah suatu solidaritas yang besar," kata Renan, "tercipta oleh perasaan-perasaan yang disebabkan oleh pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan yang cenderung akan dibuat lagi di masa depan. Suatu nation mempunyai masa lampau akan tetapi meneruskan dirinya dalam masa kini dengan suatu fakta yang tegas: kesepakatan, kehendak yang dinyatakan dengan jelas untuk meneruskan hidup bersama." Kehendak untuk hidup bersama dapat dilakukan dengan siapa saja, termasuk orang-orang yang rasnya berbeda suku bangsanya berbeda, ataupun agamanya berbeda.

Konsep "nation," oleh sebab itu, mungkin merupakan konsep yang lebih tepat merujuk pada bagian-bagian penduduk di kepulauan Indonesia yang dimaksud bilamana kita berbicara tentang "integrasi" nasional dari pada konsep "bangsa."

BEBERAPA FAKTA SEJARAH

Pada permulaan abad XX mulai terbentuk pengelompokan-pengelompokan sosial, ekonomi dan politik baru di masyarakat jajahan Hindia-Belanda; kolektiva-kolektiva sosial baru yang tidak lagi didasarkan atas hubungan kekerabatan atau kebudayaan tradisional (adat).

1. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam bidang pendidikan modern: berbagai jenis sekolah dasar dan kemudian menengah; sejak 1920 juga beberapa perguruan tinggi. Sistem pendidikan tidak satu: pribumi (agama; umum), Belanda, Cina dan Arab.
2. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam lapangan kerja: perusahaan dagang, persuratkabaran, dan sebagainya.

3. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam bidang sosial dan politik atas dasar solidaritas kedaerahan: Boedi Oetomo, 1908; Ambonsch Studiebonds, 1909; Ambon's Bond, 1909; Mena Moeria, 1913; Paguejoeban Pasoendan, 1914; Sarekat Soematra, 1918; Sarekat Ambon, 1920; Kaoem Betawi, 1923; Sarekat Madoera, 1925; dan sebagainya.
4. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam bidang agama: Sarekat Islam, 1912; Moehammadijah, 1912; Centraal Sarekat Islam, 1915; Partai Sarekat Islam, 1923; Pakempalan Politiek Katolik Djawi, 1925; Nahdlatol Oelama, 1926; Persatoean Tarbijah Islamijah, 1930; dan sebagainya.
5. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam bidang kepemudaan:
 - a. Atas solidaritas kedaerahan: Tri Koro Darmo, 1915; Jong Java, 1918; Sekar Roekoen; Jong Soematanen Bond, 1918; Studeerenden Vereeniging Minahassa, 1918; Ambonsche Studeerenden (Jong Ambon), 1923; Jong Batak's Bond, 1925; dan sebagainya.
 - b. Atas dasar kebangsaan Indonesia: Perhimpoean Peladjar-peladjar Indonesia, 1926; Jong Indonesia (Pemoeda Indonesia), 1927; Indonesia Moeda, 1931; dan sebagainya.
 - c. Atas dasar agama: Jong Islamieten Bond, 1925; Moeda Katolik, 1929; Ansor Nahdlatol Oelama, 1932; dan sebagainya.
6. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial dalam bidang kemahasiswaan: Bataviaasche Studenten Corps, 1924; Indonesische Studentenvereeniging Bandung; Unitas Studiosorum Indonesiensis, 1933; dan sebagainya.
7. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial atas dasar solidaritas rasial:
 - a. Tiong Hua Hwee Koan, 1900; Kuo Min Tang; Sin Po; Cung Hua Hui; Partai Tionghwa Indonesia, 1932; dan sebagainya.
 - b. Persatoean Arab Indonesia, 1936; Indo-Arabische Beweging, 1939; dan sebagainya.
 - c. Insulinde; Indische Partij 1912; National Indische Partij, 1919; Indo-Europeesch Verbond, 1919; dan sebagainya.
8. Pembentukan kolektiva-kolektiva sosial atas dasar kebangsaan Indonesia: Perserikatan Nasional Indonesia (kemudian: Partai Nasional Indonesia), 1927; Permoefakatan Perhimpoean-perhimpoean Politik Kebangsaan Indonesia, 1930; Partij Indonesia, 1930; Persatoean Bangsa Indonesia, 1931; dan sebagainya.

Pada tanggal 28 Oktober 1928 Pemuda-pemuda yang menghadiri Kongres Pemuda Indonesia II menyatakan tekad bersama yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda:

”Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. Kedoea: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia,” tanpa menyatakan apa yang diartikan dengan ”Indonesia.”

Pada sidang Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Indonesia Merdeka yang diadakan di Jakarta tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ternyata bahwa pada waktu itu para pemimpin gerakan kebangsaan Indonesia belum sepakat tentang batas-batas wilayah dan penduduk yang dicakup oleh nama ”Indonesia.” Tanggal 11 Juli diadakan pemungutan suara dan keputusan bersama. Ternyata ada 5 kemungkinan pilihan:

1. ”Hindia Belanda dahulu.”
2. ”Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, ditambah Papua, ditambah Timor semuanya.”
3. ”Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah Borneo Utara, ditambah Papua, ditambah Timor dan kepulauan sekelilingnya,” (usul M. Yamin, Soekarno).
4. ”Hindia Belanda dahulu minus Papua” (usul M. Hatta).
5. ”Hindia Belanda dahulu, ditambah Malaka, dipotong Papua.”

(Keterangan: dengan Malaka dimaksud Semenanjung Malaka; dengan Papua dimaksud Irian).

Sesudah diadakan pemungutan suara, suara memperlihatkan 39 dari 66 suara memilih no. 3; dan 19 memilih no. 1; sehingga ketua Radjiman menyatakan:

”Dan saya tetapkan pada saat ini para anggota yang terhormat yang diputuskan, yang disahkan hari ini oleh persidangan, yaitu bahwa daerah yang masuk Indonesia merdeka: Hindia-Belanda dahulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya.”

Sebelum pemungutan suara dilakukan, Soekarno antara lain mengatakan:

”Bahkan pernah ada suatu waktu didalam hidup saya bahwa saya mengenang-ngekan suatu Pan Indonesia, satu Pan Indonesia yang meliputi pula didalamnya bukan saja Malaya dan Papua, tetapi kepulauan Pilipina Tetapi Pilipina telah Merdeka. Kedaulatan bangsa Pilipina harus kita hormati. ...”

Fakta sejarah yang memperlihatkan bagaimana ”Indonesia” diartikan oleh pemimpin-pemimpin gerakan kebangsaan kita tidak lebih dari satu bulan ditambah satu minggu sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak ditampilkan sebagai pencerminan pemikiran, bahkan keinginan, untuk memperluas wilayah Republik Indonesia, melainkan untuk memperlihatkan bahwa batas-batas pengertian ”Indonesia” adalah sangat baru. Siapa yang dianggap termasuk orang Indonesia

dan siapa yang tidak didasarkan atas "kesepakatan, kehendak yang jelas untuk meneruskan hidup bersama."

KENYATAAN YANG KITA HADAPI

Penduduk yang berjumlah lebih dari 160.000.000 manusia, hidup di kepulauan yang terbentang luas, lebih luas daripada benua Eropa atau Amerika Utara.

1. Penduduk Kepulauan Indonesia mewujudkan ras-ras manusia yang berbeda-beda (Mongoloid, Negroid, Caucasoid), masing-masing dengan ciri-ciri fisik tertentu, sebagai akibat pewarisan biologi. Banyak orang beranggapan bahwa orang-orang yang merupakan suatu ras juga mempunyai ciri-ciri kepribadian tertentu, watak tertentu, malah kebudayaan tertentu, tetapi kenyataan tidak membenarkan anggapan demikian. Ada kecenderungan pada banyak orang untuk mempertahankan kemurnian ras masing-masing, tetapi banyak orang yang menganggap diri perwujudan ras murni asli, adalah tidak murni adalah campuran. Lagi pula, sekalian ras manusia yang merupakan penduduk Indonesia masing-masing hanya merupakan sebagian dari keseluruhan ras yang bersangkutan; bagian lain dari masing-masing ras tanpa kecuali, berada di luar wilayah Indonesia.
2. Penduduk Kepulauan Indonesia mewujudkan beraneka suku-bangsa, yang dahulu masing-masing dikenal sebagai bangsa tersendiri (bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Minangkabau, bangsa Melayu, bangsa Bugis, bangsa Bali, bangsa Minahasa dan sebagainya). Masing-masing suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri (termasuk kepercayaan-kepercayaan) sendiri), bahasa sendiri, struktur masyarakat sendiri, sistem politik sendiri, dan, ini yang amat penting, wilayah (tanah air!) sendiri. Anggota-anggota masing-masing suku bangsa cenderung mempunyai identitas sebagai anggota suku bangsa yang bersangkutan dan oleh sebab itu dalam keadaan tertentu mewujudkan rasa setia kawan, solidaritas, dengan sesama anggota suku bangsa yang bersangkutan di kota-kota besar, seperti Jakarta, terdapat sejumlah orang yang tidak mempunyai identitas suku bangsa tetapi jumlah orang-orang demikian sangat sedikit dibanding dengan orang-orang yang mempunyai identitas suku bangsa. Di masing-masing daerah ada suku bangsa tertentu yang merupakan mayoritas; orang-orang lain merupakan minoritas. Suku bangsa yang merupakan mayoritas di satu daerah bisa merupakan minoritas di daerah lain. Di beberapa daerah tidak ada mayoritas yang jelas. Minoritas tidak selalu merupakan golongan yang terugikan oleh mayoritas. Orang-orang yang bukan kelahiran daerah yang bersangkutan, malah sering kali orang-orang yang bukan anggota suku bangsa yang menganggap daerah yang bersangkutan sebagai kampung ha-

lahan, tanah air, tanah yang diwarisi dari para nenek moyang, cenderung dianggap sebagai "orang luar," "bukan orang kita" oleh orang-orang pribumi daerah yang bersangkutan.

3. Penduduk Kepulauan Indonesia mewujudkan berbagai agama, sehingga terbentuk berbagai umat agama besar: Islam, Kristen Protestan, Katolik Roma, Hindu-Bali. Penganut masing-masing agama besar, terutama agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik Roma berkeyakinan bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang benar dan berbagai penganut, oleh sebab itu, merasa berkewajiban berusaha agar orang-orang yang tidak menganut agama yang bersangkutan dijadikan penganutnya. Masing-masing umat merupakan suatu masyarakat moral yang juga merupakan suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang sedikit banyaknya solider satu dengan yang lain. Di satu pihak, masing-masing agama besar memperkuat persatuan nasional Indonesia karena mempersatukan para penganut agama yang sama dari berbagai ras, berbagai suku bangsa, berbagai golongan sosial lain menjadi satu umat, tetapi di lain pihak masing-masing agama besar bisa menghambat persatuan nasional Indonesia karena para penganutnya bisa memisahkan orang lain yang tidak seagama, malah menolak mengganggu orang-orang yang tidak seagama ini.

Adanya perbedaan ras pada penduduk di Kepulauan Indonesia, yang batas-batas pemisahannya pun sangat kabur karena banyaknya percampuran antar ras di masa lalu dan sekarang ini, tidak dapat dipungkiri, harus diterima sebagai kenyataan yang tidak mungkin dan tak perlu diubah. Begitupun halnya dengan perbedaan suku bangsa. Paling sedikit sekalian suku bangsa yang besar, yang banyak anggotanya akan bertahan terus sebagai kolektiva-kolektiva sosial yang mempunyai kebudayaan sendiri dan wilayah kediaman sendiri. Orang-orang Fries di Nederland, orang-orang Basque di Spanyol, orang Georgia di Uni Soviet, orang Scotlandia di Inggris dan banyak lagi kolektiva-kolektiva sosial yang sejenis tetap bertahan meskipun mengalami industrialisasi, modernisasi. Perbedaan agama pun haruslah diterima sebagai kenyataan yang tidak bisa diubah. Selain beberapa orang perorangan, pada umumnya masing-masing orang, betapapun lemahnya keyakinan agamanya tidak akan menjadi penganut agama lain, sehingga masing-masing agama akan bertahan dengan jumlah penganut yang cukup besar untuk memungkinkan kehidupan agama yang terus-menerus berkembang subur.

Karena perbedaan-perbedaan ras, suku bangsa dan agama tidak dapat diubah, haruslah diusahakan pengaturan hubungan antar ras, antar suku bangsa, dan antar agama yang tidak merugikan satu sama lain, malah, kalau dapat, saling mendukung satu sama lain.

CITA-CITA KITA

Cita-cita kita bersama adalah sederhana tetapi agung: suatu masyarakat di mana sekalian golongan (kecuali golongan penjahat) dapat hidup rukun, mengembangkan diri tanpa merugikan golongan lain dan bahkan membantu, mendukung golongan-golongan lain, sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Cita-cita demikian hanya dapat tercapai bilamana kita semua berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita maupun berpedoman pada Pancasila.

Peranan Dunia Usaha dan Kewiraswastaan dalam Pembentukan Bangsa

Daoed JOESOEUF

Wiraswasta dan pengusaha di dalam pekerjaannya sehari-hari tidak mungkin diabstrakkan dari bangsa di mana mereka tergolong. Karena, secara fundamental hubungan ekonomi selalu merupakan campuran antara pertukaran barang dan perbandingan kekuatan. Perbedaan dan ketidaksepadanan dalam kekuatan para pelaku ekonomi yang mengadakan hubungan tetap merupakan faktor yang ikut menentukan dan ini lebih-lebih berlaku sejauh hubungan tersebut terletak di bidang perdagangan (pertukaran) internasional. Baik harga maupun kuantum yang disepakati di bidang ini selalu ditandai oleh faktor kekuatan tersebut, demikian pula arus dan keseimbangan barang dan jasa yang terbentuk di situ. Dari cara melihat seperti ini kiranya dapat disimpulkan beberapa tanggapan-ekonomi mengenai "bangsa."

Suatu bangsa dalam dirinya merupakan satu kombinasi kegiatan dan usaha ekonomi (industri) para warganya. Isi, dimensi dan pengelompokan kegiatan tersebut ke dalam berbagai sektor (pertanian, pertambangan, perindustrian, administrasi, dan lain-lain) menentukan struktur neraca pembayarannya terhadap luar negeri, kesanggupannya mempengaruhi bangsa lain dan kemampuannya menerima ataupun menolak pengaruh dari luar.

Suatu bangsa, dipandang dari sudut lokalisasi usaha dan kegiatan ekonomi para warganya, merupakan gabungan daerah maju dan terbelakang, kombinasi jaringan transpor dan zona penggerak pembangunan. Sifat, letak dan bobot elemen-elemen itu di dalam keseluruhannya menentukan apakah kegiatan bangsa ini akan sampai melampaui batas kebangsaannya atau menerima kegiatan lanjutan dari bangsa lain.

Suatu bangsa adalah kombinasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dan finansial. Kombinasi ini merupakan dasar kemampuannya untuk mengenga-

ruhi partnernya di bidang internasional dan atau menghadapi pengaruh yang hendak didesakkan oleh pihak lain kepadanya. Kemampuan ini diterapkan baik melalui pasaran modal, uang ataupun mythe uang nasionalnya.

Di bidang pertukaran barang dan jasa antar-bangsa, perkembangan teknologi telah mengubah "ekonomi internasional" menjadi *ekonomi-dunia* melalui perubahan yang ditimbulkannya dari ekonomi "faktor produksi" menjadi ekonomi "pengetahuan." Bangsa yang tidak turut ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi-dunia tersebut berarti menulis resep bagi dekadensi ekonomi nasionalnya sendiri. Turut berkecimpung dalam ekonomi-dunia berarti tidak mengasingkan dan menutup diri secara autarkis tetapi berarti secara sadar mengaitkan perkembangan ekonominya pada perkembangan ekonomi bangsa lain. Ternyata sangkut-paut ekonomi bangsa-bangsa itu sudah begitu rupa sehingga dapat dikatakan bahwa kini praktis tidak ada satu bangsa pun yang benar-benar berdiri sendiri, sesedikitnya tidak di semua bidang ekonomi.

Bagi pelaku ekonomi individual, besar kecilnya hasil yang dapat ditariknya dari keturutsertaannya di bidang lalu-lintas pertukaran internasional, tergantung sekali dari keseluruhan struktur di mana dia tergolong; dengan perkataan lain, tergantung pada "bangsa" mana dia termasuk. Sebaliknya, struktur yang berbeda-beda dari bangsa tidak hanya menentukan perbedaan hasil pelaku ekonomi individual, tetapi juga menentukan akibat dan pengaruh yang diterima bangsa itu sendiri dari keturutsertaannya dalam ekonomi dunia. Dengan perkataan lain, ekonomi dunia memberikan pengaruh yang asimetrik terhadap bangsa-bangsa sesuai dengan "struktur" yang membentuk tubuh bangsa itu sendiri. Maka itu bagi sesuatu bangsa yang ingin turut serta dalam ekonomi dunia, dan memang hampir tidak mungkin untuk tidak turut, sebaiknya lebih dahulu meneliti dengan sempurna struktur yang membentuk dirinya. Apakah struktur yang dipunyainya merupakan modalitas yang kuat (ampuh) atau lemah untuk terjun di dalam ekonomi dunia.

Ekonomi dunia seperti yang kita alami sekarang dilahirkan dan dibesarkan oleh suatu wawasan politik yang tumbuh dan berkembang dengan pesatnya di Eropa Barat sesudah Perang Dunia Kedua, yang mulai tahun 1974 dalam berbagai kesempatan saya sebut dengan satu istilah yang saya kira sekarang ini masih tetap berlaku, yaitu "nasionalisme baru."¹ Nasionalisme baru (di Eropa Barat) inilah yang secara esensial memelopori pembentukan ekonomi dunia yang semakin lama menjadi semakin kukuh dengan pertumbuhan kede-wasaannya.

¹Lihat antara lain, Daoed Joesoef, "Knowledge Economy and World Economy," *Indonesian Quarterly*, Vol. II, No. 2 (January 1974), dan "The New International Economic Order," *Indonesian Quarterly*, Vol. V, No. 1 (January 1977).

Bila ada "nasionalisme baru" tentu ada bandingannya yang layak disebut sebagai "nasionalisme lama." Memang ada nasionalisme lama ini, tetapi dalam kenyataannya berusia tidak "setua" berbagai bentuk utama dari politik Eropa di bidang kebangsaan dan ketatanegaraan. Abad ke-19 merupakan suatu peralihan dari Eropa-Kerajaan yang dibentuk oleh dinasti sesuatu keluarga ke Eropa-Kebangsaan yang dibentuk oleh rakyat yang berdaulat. Namun dalam berbuat begini rakyat tersebut mengambil-alih pula sebagian dari hasrat-hasrat kemutlakan dari monarki di tahap akhir purna-feodalnya itu.

Di masyarakat Eropa abad ke-19 itu terdapat dua golongan utama, yaitu kaum tani yang sudah dibebaskan dari kekuasaan tuan-tuan tanah dan kaum menengah yang untuk sebagian besar terdiri dari wiraswasta dan pengusaha kecil serta sebagian kecil cendekiawan dan pekerja otak (knowledge workers). Mereka ini turut memupuk perkembangan nasionalisme lama dengan wawasan kaumnya masing-masing.

Sumbangan kaum tani pada perkembangan politik nasional Eropa ketika itu berupa wawasan kewilayahan. Sumbangan seperti ini ternyata kemudian berakibat fatal karena ia merumuskan keamanan, progres dan kepentingan nasional dalam artian luasnya tanah -- di satu benua di mana setiap jengkal tanah sudah ada yang memilikinya. Mengingat teknologi pertanian belum maju ketika itu, satu-satunya harapan petani untuk memperoleh keberuntungan ekonomi adalah dengan jalan mendapat tanah garapan yang lebih luas. Rasa "kekurangan tanah" ini dihayati pula oleh pemerintahnya masing-masing dan dijadikan pegangan dalam kebijakan luar negerinya. Berhubung dengan itu letak garis perbatasan nasional menjadi masalah yang diperdebatkan antar-bangsa. Sampai Perang Dunia Kedua, tuntutan Hitler untuk memperoleh "Lebensraum" bagi Jerman di sebelah timur negerinya segera didukung oleh rakyat Jerman yang merasa bahwa energi nasionalnya sangat terkekang oleh batas-batas negerinya yang ada.

Kaum menengah Eropa mempunyai juga kecenderungan politik yang sama. Dalam berpolitik mereka meminta dari pemerintahnya masing-masing campur tangan sesedikit mungkin di samping bantuan sebanyak mungkin untuk mendapatkan pasaran dan mempertahankannya bila berhasil direbut. Pengaruh mereka ini akhirnya menimbulkan pertarungan ekonomi di Eropa dan penjajahan di luar Eropa. Kaum menengah Eropa kiranya menganut pula pendirian kaum tani yang serba mutlak atas apa yang dimiliki. Sebab, biar bagaimanapun kaum tani ini adalah "leluhur" mereka. Namun ketika dilanjutkan ke kebijakan luar negeri, pendirian seperti itu menjadi pendirian "nasionalisme lama" tentang kedaulatan yang tidak terbatas.

Sama halnya dengan Eropanya dinasti, dewasa ini Eropanya petani dapat dikatakan sudah lenyap. Setiap tahun jumlah petani terus menurun. Betapapun rendahnya pendidikan formal yang ditempuh petani untuk menjalankan

fungsi profesionalnya, ia sadar bahwa sekarang ini lebih banyak pupuk, lebih banyak mesin, pasaran yang lebih luas -- dan barangkali dukungan harga dari pihak pemerintahnya -- merupakan jalan yang lebih baik ke arah progres ke-timbang luasnya tanah.

Di pihak lain, kaum menengah mendorong kelahiran dan penggunaan teknologi modern di Eropa. Memang baru kira-kira 40 tahun yang terakhir ini dapat dilihat betapa implikasi teknologi telah mengubah struktur sosial dan sikap politik benua tua Eropa. Ia kini sadar bahwa tanah dan sumber-sumber fisik bukan lagi merupakan faktor-faktor penghambat bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bangsa. Untuk menaikkan derajat hidup rakyatnya ia tidak perlu lagi berkembang secara horisontal dengan berpijak pada tanah bangsa lain karena tujuan yang sama kini dapat dicapainya dengan bergerak secara vertikal ke dalam ruang progres teknologi yang tidak terbatas.

Dengan begini lahirlah apa yang saya sebut sebagai "nasionalisme baru" di Eropa, suatu wawasan politik yang dihidupi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang ketatanegaraan ia telah memupuk pengertian "negara-bangsa," yang sebelum Perang Dunia Kedua praktis tidak dikenal. Di bidang ekonomi, ia telah membentuk "ekonomi pengetahuan" di dalam negeri dan "ekonomi dunia" di luar negeri, yaitu dua bentuk ekonomi yang sebelum Perang Dunia Kedua juga tidak dikenal.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas kiranya dapat dikatakan bahwa ada tempat yang terhormat bagi pengusaha dan wiraswasta di masyarakat nasional kita. Tempat mereka ini di masyarakat bisnis yang dalam dirinya merupakan bagian (sub-community) dari masyarakat nasional kita. Melalui kegiatan profesional mereka ini masyarakat bisnis menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan karenanya memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembentukan pendapatan nasional. Kelimpahan material yang dihasilkan ini pada gilirannya mensubsidi hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan intelektual-spiritual yang pada pokoknya dihasilkan oleh masyarakat-bagian lainnya (masyarakat religius, masyarakat artistik, masyarakat ilmiah, dan lain-lain).

Mengingat tempat kedudukan mereka ini, pengusaha dan wiraswasta sebenarnya tidak hanya dapat, bahkan seharusnya ikut berperan-serta secara aktif dalam usaha pembentukan bangsa (nation building). Mereka secara sadar dan sistematis harus membuat bangsa kita berstruktur ekonomi yang sepadan untuk mampu turut-serta secara menguntungkan dalam kegiatan ekonomi dunia, sesedikitnya untuk sanggup menghadapi akibat atau pengaruh yang asimetrik dari perputaran ekonomi dunia itu. Untuk tujuan nasional ini mereka seharusnya membuat ekonomi nasional Indonesia menjadi paralel dengan ekonomi-ekonomi nasional lainnya yang "merajai" ekonomi dunia tersebut melalui pembinaan dunia usaha yang mereka pimpin dan miliki

masing-masing. Dengan perkataan lain, mereka harus berusaha membuat ekonomi nasional Indonesia menjadi "ekonomi pengetahuan" (knowledge economy) melalui pembinaan dunia usaha yang mereka pimpin dan miliki masing-masing.

Demi pembentukan bangsa melalui pembentukan ekonomi pengetahuan ini, yang dapat dilakukan oleh para pengusaha dan wiraswasta kita berupa empat hal pokok.

Pertama, menerapkan sebanyak mungkin teknologi baru dalam proses produksi yang menjadi urusan bisnis-industrialnya dan tidak hanya puas dengan metode serta prosedur tradisional yang sudah diketahui. Dengan menerapkan teknikalitas hasil ilmu pengetahuan yang terus berkembang ini, para pengusaha dan wiraswasta tidak mengabaikan unsur penting yang telah membina nasionalisme baru di kalangan golongan menengah Barat dan yang kiranya telah menjwai pembentukan ekonomi dunia.

Kedua, pengusaha dan wiraswasta Indonesia harus mempekerjakan sebanyak mungkin pekerja otak (knowledge workers) di perusahaannya masing-masing. Berkat training formal yang telah dialaminya, biasanya pekerja otak inilah yang sangat berminat pada hasil-hasil ilmu pengetahuan terapan dan karenanya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan tersebut terus-menerus. Kepada mereka ini harus diberikan kesempatan oleh majikannya untuk turut serta dalam forum-forum diskusi internasional yang membahas masalah-masalah teknologi.

Ketiga, dunia usaha sebaiknya mulai membangun pusat-pusat penelitiannya sendiri bagi keperluan perkembangan bisnis jangka panjang di masa depan. Di samping ini mereka selayaknya turut memberikan sumbangan finansial atau peralatan secara teratur kepada lembaga-lembaga riset di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan begini terciptalah kaitan fungsional yang erat antara masyarakat bisnis dan masyarakat ilmiah. Kaitan seperti ini terbukti sangat bermanfaat bagi pembentukan bangsa di Eropa Barat, Amerika Serikat dan Jepang, karena secara fungsional masyarakat ilmiahlah yang menghasilkan pemikiran-pemikiran baru, sedangkan masyarakat bisnislah yang secara profesional menerapkan teknikalitas yang dilahirkan oleh pemikiran-pemikiran ilmiah tersebut. Berkat kerjasama seperti ini terciptalah basis domestik dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu diperlukan oleh bangsa kita untuk dapat turut bermain dengan menguntungkan dalam ekonomi dunia. Mengingat bobot serta kemampuan hasil-hasil ilmu pengetahuan di segala bidang kehidupan dan penguasaan yang mendekati mutlak oleh negara-negara maju atas ilmu pengetahuan, kiranya dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan inilah yang merupakan garis pertama pertahanan dari negara-bangsa yang relatif baru merdeka di abad ke-21 mendatang. Bila negara-bangsa yang terakhir disebut ini lalai, maka garis pertama pertahanan

ini akan menjadi sekaligus garis terakhir dari pertahanan keberadaannya di peta dunia.

Keempat, secara sendiri-sendiri atau secara patungan bersama-sama mendirikan Pusat Latihan Teknik (PLT) yang tidak hanya terbuka bagi karyawan perusahaan tetapi juga terbuka bagi umum, khususnya remaja dan pemuda yang memang berhasrat meningkatkan keterampilannya. Usaha seperti ini pasti mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomi.

Manfaat sosial berupa pelaksanaan asas keadilan, karena melalui training seperti ini asas keadilan yang dituju oleh pembangunan kita dapat lebih terjamin. Betapa tidak. Keadilan di sini tercapai bukan melalui pembagian pendapatan yang lebih merata, tetapi melalui penggunaan lebih banyak oleh pembangunan sumber energi yang praktis dimiliki oleh setiap warga negara, yaitu tenaga kerja manusia. Artinya, dengan meningkatkan mutu teknis tenaga kerja dari "unskilled" menjadi sesedikitnya "rather skilled," kita tidak hanya membantu menaikkan kapasitas mencari nafkah individual, tetapi melipatgandakan modal manusia negeri kita.

Bila direnungkan lebih mendalam, sebenarnya training besar-besaran di bidang teknologi juga mempunyai arti ekonomi yang besar. Adalah satu kenyataan bahwa salah satu kekurangan yang fundamental bagi usaha pembangunan Indonesia adalah kurangnya tenaga teknis menengah yang harus melaksanakan apa-apa yang sudah diputuskan di atas. Teknisi menengah ini, di negeri mana pun, pada dasarnya tidak dihasilkan dalam lingkungan pendidikan formal.

Sekolah-sekolah paling jauh hanya dapat melatih ke arah penguasaan peralatan analisa, baik yang bersifat matematik maupun filosofis. Teknisi menengah ditempa dan dihasilkan di pusat-pusat kegiatan produksi dan bisnis. Di negeri-negeri yang sudah maju pusat-pusat kegiatan tersebut tidak kurang jumlahnya, baik yang berupa pabrik, galangan kapal, maskapai bangunan, asuransi, perbankan, biro administrasi, dan lain-lain. Di negeri yang belum maju seperti Indonesia, justru tempat-tempat penggemblengan tenaga teknis menengah yang seperti itu sangat kurang jumlahnya, sedangkan perkembangan pusat-pusat kegiatan produksi dan bisnis tersebut pada gilirannya sangat tergantung pada ada tidaknya tersedia tenaga teknis menengah tadi. Alhasil terjadilah satu lingkaran yang tak berujung-pangkal.

Maka untuk dapat ke luar dari lingkaran yang mencekik ekonomi ini perlu ditingkatkan kegiatan training keterampilan teknik dan industrial arts dan guna membiayai kegiatan yang terang menelan banyak biaya itulah diperlukan suatu usaha patungan berupa Pusat Latihan Teknik. Dengan begini kita berarti memasukkan teknologi itu sendiri ke dalam masyarakat dan bukannya hanya puas dengan mengimpor hasil-hasil teknologi yang berkembang dan dikembangkan di negeri lain.

Beberapa Bentuk Konkret Kontribusi Pengusaha dalam Pembangunan Nasional

KWIK Kian Gie*

Pembangunan nasional adalah pembangunan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Masyarakat nasional Indonesia, seperti juga dengan masyarakat-masyarakat nasional lainnya, terdiri dari berbagai jenis bagian masyarakat (sub communities), seperti masyarakat politik, masyarakat ilmiah, masyarakat artistik, masyarakat keagamaan, masyarakat bisnis, dan lain-lain. Masyarakat bisnis merupakan sekaligus dunia usaha dan ruang lingkup kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi keperluan konsumtif, dan melalui proses produksi dan konsumsi ini membentuk pendapatan nasional. Maka sesuai dengan peranan alamiahnya dan berdasarkan kemampuan teknisnya, masyarakat bisnis ini secara terpadu dengan bagian-bagian masyarakat lainnya, turut mewujudkan apa-apa yang dicita-citakan oleh negara bangsanya.

Bertitik tolak dari kerangka acuan ini, jelaslah bahwa dunia usaha dan kewiraswastaan merupakan bagian tak terpisahkan dari total community kehidupan bernegara dan berbangsa, dan dengan sendirinya mempunyai peranan yang sangat besar, karena hakikatnya yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan produktif dalam menyediakan barang dan jasa bagi seluruh anggota masyarakatnya.

Dalam kaitannya dengan submasyarakat lainnya, masyarakat bisnis dalam artian yang luas pada tubuhnya melekat potensi konflik yang rumit dengan sub communities lainnya. Disatu fihak, masyarakat bisnis cenderung dianggap hidup dengan tata nilai dan patuh pada kekuatan-kekuatan di dalam dunia bisnis yang serba materialistis. Perasaan ini dalam bentuk ekstreminya

*Sekretaris Badan Pengurus Harian Yayasan Prasetya Mulya yang disuruh mengawasi Bidang Akademis dari Institut Manajemen Prasetya Mulya.

menganggap masyarakat bisnis sebagai pengelompokan orang-orang yang merupakan business animal, orang yang di dalam hidupnya hanya mengenal berbisnis dan mencari uang, tanpa peka dan memperdulikan terhadap nasib masyarakat sekelilingnya. Dilain fihak, bisnis dalam artian yang luas, di mana faktor yang menonjol adalah kemampuan manajerialnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, sangat dibutuhkan oleh para produsen dan konsumen dari barang-barang yang sifatnya memenuhi kebutuhan intelektual dan spiritual seperti lukisan, hasil seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Artinya, walaupun bisnis mudah dirasakan sebagai bertentangan dengan tata nilai yang berlaku dan dianggap baik oleh submasyarakat lainnya, pada tubuhnya, bisnis mengandung faktor penting dalam bentuk kemampuan manajerial, yang justru sangat dibutuhkan oleh submasyarakat yang memusuhinya.

Persepsi yang salah terhadap dunia bisnis dari masyarakat non-bisnis disatu fihak, dan perilaku para usahawan sendiri yang kebanyakan buta terhadap lingkungan non-bisnisnya, seringkali mengakibatkan ketegangan antara submasyarakat lainnya terhadap dunia bisnis. Oleh karena itu, masalahnya perlu dikaji lebih mendalam untuk menyelaraskan persepsi di antara berbagai submasyarakat, terutama antara masyarakat bisnis dan sub-submasyarakat lainnya.

Bahwa Pemerintah Orde Baru mengakui sangat pentingnya peranan dunia usaha dan kewiraswastaan untuk pembangunan nasional, kiranya bagi semua orang telah jelas. Berkali-kali dalam berbagai kesempatan dijelaskan oleh para pemimpin negara kita, bahwa tata ekonomi Indonesia adalah ekonomi campuran, di mana sektor negara dengan BUMN-BUMN-nya, Koperasi yang menghimpun kegiatan bisnis rakyat dan sektor swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing, diberi kesempatan berusaha yang sebesar-besarnya. Tetapi toh pada saat-saat tertentu kita dengarkan suara antipati terhadap sektor swasta, yang oleh sebagian orang dirasakan bahwa kegiatan sektor swasta cenderung membawa masyarakat kita kepada kapitalisme yang keji dan pada hakikatnya menindas kepentingan rakyat banyak yang miskin. Beberapa fihak bahkan mempermasalahkannya secara lebih ekstrem, sehingga hampir tidak ada bedanya dengan pandangan-pandangan yang didasarkan atas faham seperti Marxisme-Leninisme dan Marxisme-Maoisme. Saya katakan ini, oleh karena beberapa fihak secara prinsipial mempermasalahkan apakah pemilikan modal oleh swasta di dalam alam Indonesia yang ber-Pancasila dapat dibenarkan.

Banyak teori, subteori, dan bahkan kuasi teori sering dipakai orang untuk melakukan pembahasan di berbagai kesempatan dan media masa. Kalau kita ambil intinya, maka hakikat yang dipermasalahkan adalah apakah pemilikan

modal oleh swasta perorangan dibenarkan, dan apakah pembangunan nasional Indonesia boleh memberikan tempat kepada unit-unit produksi yang dimiliki oleh perorangan. Selama masalah ini tidak jelas atau dibuat tidak jelas oleh kelompok yang vokal dan memperoleh liputan yang luas oleh media masa, selama itu pula masyarakat akan meragukan peran serta dunia usaha dan kewiraswastaan dalam pembangunan nasional.

Tadi telah dikatakan bahwa tata ekonomi Indonesia adalah ekonomi campuran antara BUMN, Koperasi, dan Swasta. Walaupun demikian, toh ada kelompok-kelompok ekstrem yang tidak mau menerima adanya sektor swasta. Yang kurang ekstrem, tetapi pada dasarnya cenderung tidak mau menerima peran sektor swasta, mempermasalahkan porsi pembagian sektor negara, koperasi dan swasta secara mendiskreditkan sektor swasta. Dilema ini adalah dilema klasik dan terdapat di mana saja. Debat mengenai ini juga sudah lama berlangsung dan terhimpun dalam buku dan tulisan-tulisan yang tidak terhingga banyaknya. Maka cukup saya katakan bahwa ini adalah masalah yang sangat sulit untuk ditentukan secara terencana dengan eksak dan konkret. Walaupun demikian, porsi yang pernah diberikan kepada sektor swasta, dan swasta sudah menanam modalnya ke dalam bidang yang bersangkutan, hendaknya porsi ini jangan diubah-ubah di tengah jalan, kalau kita benar-benar ingin swasta mempunyai peran yang efektif bagi pembangunan nasional.

Eropa Barat, terutama di negara-negara yang disebutkan sebagai welfare states, cenderung untuk membatasi kegiatan bisnis oleh sektor negara sampai pada public utility yang sangat penting sebagai penunjang kehidupan sektor swasta, dan dianggap penting bagi kehidupan rakyat banyak, yang langsung merupakan elemen penting bagi kemakmuran tingkat hidupnya, karena merupakan kehidupan pokok, seperti listrik, angkutan umum, air minum, telekomunikasi dan sebagainya. Pada hakikatnya, sektor negara hanya membatasi diri pada produksi barang dan jasa yang membutuhkan investasi sangat besar, sedangkan laba dari investasi yang bersangkutan menduduki tempat kedua, yang kalau perlu dikorbankan. Bagi negara-negara "welfare states" ini, pemilikan modal atau unit-unit produksi yang berapa pun besarnya oleh swasta tidak dipermasalahkan. Bahkan lain daripada di Amerika Serikat yang mengenal "anti-trust law," Eropa Barat mengizinkan membesarnya satu atau dua perusahaan swasta tertentu, asalkan caranya adalah sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku, dengan memanipulasikan kekuatan-kekuatan pasar yang ada, dan tidak dengan cara-cara kotor seperti merusak barang dagangan saingannya untuk dilepas lagi ke pasaran, melakukan intimidasi para penyalur untuk memboikot barang-barang saingannya, memakai jasa-jasa mafia, melakukan bisnis dalam barang-barang terlarang seperti heroine dan sebagainya. Tetapi sekalipun demikian, toh kita saksikan hampir runtuhnya sistem "welfare states" Eropa Barat, karena perusahaan-perusahaan hampir tidak

sanggup lagi menopang beban-beban sosial yang harus dipikulnya demi kesejahteraan buruh dan rakyat seluruh bangsanya melalui pajak yang berat dan premi untuk "social security system."

Menggunakan istilah yang lazim kita dengar, "welfare states" tidak berfikir dalam istilah kue yang harus dibagi-bagi, melainkan berfikir dalam istilah pohon yang harus sehat, besar, kuat dan berbuah banyak. Pohon boleh dimiliki oleh siapa saja, asalkan buahnya dibagi seadil mungkin. Sedemikian jauhnya akhirnya dunia usaha swasta di sana diperas, sehingga banyak yang tidak tahan, gulung tikar, dan pengusahanya mengalihkan modal dan usahanya ke negara lain, terutama Amerika Serikat.

Apa yang ingin dikemukakan dengan mengemukakan contoh welfare states ini adalah bahwa apabila peranan swasta dalam pembangunan nasional diakui dan oleh karena itu kepada swasta diberikan tempat, pada dasarnya tidak perlu dikhawatirkan bahwa ini akan membawa akibat ketimpangan dalam bidang keadilan sosial, asalkan kita pandai-pandai membagi secara adil laba yang dibuahkan oleh para pengusaha sektor swasta ini. Memang harus segera kita akui, bahwa pemerataan hasil usaha swasta, yang pemilikan unit-unit produksinya ada di tangan para pemilik modal swasta, membutuhkan sarana kemampuan manajerial dan administrasi yang besar dan "sophisticated." Sistem demikian juga membutuhkan aparat pemerintah yang sangat bersih dan berwibawa. Sistem ini membutuhkan penciptaan organisasi social security system, yang pada hakikatnya adalah asuransi raksasa secara nasional dengan perhitungan aktuarial yang rumit dan pencatatan yang cermat.

Kita semua memahami bahwa tahap perkembangan dalam pembangunan kita belum mencapai tingkat kesempurnaan yang demikian. Maka tidak mungkin bahwa kita mengharap dari masyarakat untuk memberikan peluang tanpa batas kepada pemilikan unit-unit produksi oleh para kapitalis, dengan pola berfikir pohon dan buah. Sebabnya karena pada saat ini tidak akan ada aparat yang mampu membagi buahnya, sehingga kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi para kapitalis memang hanya akan memberikan kesempatan kepada para kapitalis ini tanpa adanya 'trickle down effect' yang memadai.

Dalam masyarakat yang demikian, rakyat secara naluri mengetahui dan merasakan bahwa mereka tidak banyak mendapat manfaat dari bekerjanya kaum kapitalis, kecuali mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang serba minimal.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa yang dimaksudkan tidak menentang kepemilikan modal oleh swasta, dan tidak menentang menjadi besarnya perusahaan-perusahaan swasta secara prinsipial. Tetapi pembengkakan ini

hanya dapat ditoleransikan apabila ada jaminan keadilan dari pembagian pendapatannya.

Dalam negara-negara maju "welfare states," di mana kemampuan managerial dan administrasi untuk melakukan pemerataan laba sudah sangat memadai, pemisahan yang tegas antara segi pemilikan modal dan pembuatan laba di satu pihak, dan penggunaan labanya di lain pihak, terjamin. Karena pemilikan memberikan perasaan bahwa unit produksi mutlak adalah miliknya, dan karena pemilikan memberikan kebebasan untuk secara kreatif memajukan perusahaannya, maka faktor-faktor psikologis yang penting ini dibiarkan. Rakyat dan pemerintahnya merasa yakin akan dapat meratakan hasilnya secara adil. Dalam negara yang belum memiliki kemampuan-kemampuan ini, dari para pengusaha sendiri dituntut untuk menunjukkan kepekaannya terhadap lingkungan sosial sekitarnya, kepekaan terhadap para pelaku bisnis yang menjungnya, dan yang menjadikannya besar.

Hal ini yang menurut pengamatan kurang disadari oleh para pengusaha di sini. Mereka selalu merasa heran dan mempertanyakan, kesalahan apa yang mereka perbuat, sehingga mereka cenderung untuk dimusuhi oleh pendapat umum, dan mereka cenderung dianggap sebagai business animal?

Secara rasional murni, selama mereka diberi tempat untuk berusaha, dibenarkan untuk memiliki unit-unit produksi yang berapapun besarnya, asalkan menuruti peraturan-peraturan legal yang ada, apa lagi yang harus mereka lakukan?

Dengan kepekaan terhadap sub communities di sekitarnya, jawabnya sebenarnya jelas. Di dalam negara yang maju, manfaat dari adanya mereka tercermin dan dapat dengan konkret dinikmati dalam bentuk berbagai macam kenikmatan dan kesejahteraan dari 'social security system' yang sebagian besar dibayar oleh produsen/kapitalis. Di Indonesia, pemerintah belum mempunyai program 'Social security' ini, sehingga memang sering dirasakan adanya kesenjangan yang besar antara kenikmatan yang diperoleh oleh pengusaha pemilik, dan 'stockholders' lainnya.

Jadi peranan pengusaha swasta dalam pembangunan nasional sangat besar, karena per definisi, apa pun yang dihasilkannya turut membentuk pendapatan nasional. Ini adalah per definisi, dan karenanya mutlak dan jelas. Namun pembangunan nasional menuntut pula keadilan, dan keselarasan tata nilai dari masyarakat bisnis dengan sub-submasyarakat lainnya.

Terutama bagi Indonesia yang masih dalam tahapan pembangunan, di mana pemerataan belum dapat dipaksakan oleh aparat pemerintah sepenuhnya secara memadai, dari usahawan dituntut untuk bersadar diri,

berinisiatif mengembangkan berbagai macam upaya pemerataan menurut kemampuannya masing-masing.

Kini lalu timbul pertanyaan, bentuk-bentuk apakah yang bisa membantu para pengusaha untuk memperlunak pertentangan kepentingan ini? Bentuknya cukup banyak.

Banyak gagasan pernah dilontarkan di dalam berbagai diskusi dan tulisan. Dari yang sangat tidak masuk akal dan karenanya tidak dapat diterima, sampai pada gagasan-gagasan yang ngambang dan bernada sloganisme. Di samping itu banyak juga pengusaha yang telah memberikan baktinya yang sangat berguna dan nyata kepada masyarakat sekitarnya tanpa pamrih. Tetapi sayangnya, perbuatannya ini tidak dibarengi dengan publikasi yang memadai, sehingga banyak orang yang tidak tahu. Upaya dan kegiatan-kegiatan semacam ini perlu ditingkatkan dan diliput lebih luas oleh media massa.

Sekarang perlu dikemukakan bentuk-bentuk konkret yang dapat dilakukan oleh dunia bisnis swasta dalam rangka mewujudkan bakti kepada masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya sebagai perwujudan kepekaannya terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sekitarnya.

KETERKAITAN BISNIS

Arus barang dan jasa dari yang paling awal sampai ke barang jadi yang siap untuk dikonsumsi selalu melalui tahapan-tahapan produksi. Barang yang dihasilkan oleh satu perusahaan merupakan masukan bagi perusahaan selanjutnya, dan barang ini merupakan masukan lagi bagi perusahaan yang lebih dekat dengan barang yang siap untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat konsumen.

Maka setiap perusahaan yang membutuhkan bahan masukannya selalu dihadapkan pada pilihan antara membuat sendiri bahan masukannya ini atau membeli dari perusahaan lain. Di dalam textbook gejala ini dikenal dengan istilah "make or buy." Textbook mengenai manajerial accounting selalu mengajarkan teknik kalkulasi untuk tiba pada kesimpulan, manakah yang lebih menguntungkan antara membeli bahan masukannya atau membuat sendiri. Teknik-teknik ini murni-murni didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan untung-rugi finansial.

Terutama bagi perusahaan-perusahaan berskala besar, mereka selalu akan tergeliik untuk mendirikan sendiri pabrik yang menghasilkan barang masukan bagi pabrik yang telah dimilikinya. Dengan berbuat demikian, maka

dia juga bisa menjadi pemilik pabrik, dan sekaligus terjamin pasarannya, karena sebagian besar dari produksi, (atau bahkan seluruhnya), sudah akan dapat diserap oleh pabriknya sendiri di dalam kelompok perusahaan-perusahaannya sendiri. Gejala ini dikenal dengan nama "backward integration." Sebaliknya, ada perusahaan yang melakukan "forward integration" dengan membentuk perusahaan yang dapat mengolah barang produksi dari perusahaan yang sudah ada sebagai bahan masukan perusahaan yang baru akan dibentuk.

Dalam rangka itikad pengusaha, yang tanpa disuruh atau dipaksa oleh undang-undang bersadar diri untuk mewujudkan pemerataan, hendaknya dalam memutuskan pilihan antara membeli barang masukannya atau membuat sendiri, kecuali pertimbangan-pertimbangan murni finansial, juga dimasukkan ke dalam pertimbangannya dengan bobot berat unsur memberikan prioritas kepada membeli dari pengusaha lain yang kecil. Bahkan kalau perlu menghimpun beberapa pengusaha kecil untuk bergabung mendirikan pabrik di bawah bimbingannya.

Contoh yang konkret adalah industri otomotif. Bagi mereka mudah sekali mendirikan pabrik pembuatan jok. Tetapi alangkah baiknya apabila ini diborongkan kepada perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang olehnya diberi penyuluhan-penyuluhan seperlunya. Terdengar bahwa banyak industri otomotif memang sudah menjalankan ini. Perbuatan ini patut dijadikan contoh bagi industri-industri lainnya.

KETERKAITAN ASOSIASI

Dalam kasus-kasus tertentu, akan lebih efektif dan lebih murah biayanya apabila asosiasi dari perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam kelompok industri tertentu membantu peningkatan mutu dan pendapatan dari kelompok produsen yang menghasilkan barang-barang yang merupakan masukan bagi kelompok industri yang bersangkutan.

Contoh konkretnya adalah GAPPRI sebagai asosiasi pabrik-pabrik rokok kretek yang membiayai penyuluhan kepada para petani tembakau dalam rangka meningkatkan mutu, dan dengan demikian meningkatkan pendapatan para petani yang bersangkutan.

Dengan konsep dan jiwa yang sama, banyak upaya jenis dapat kita fikirkan dan kembangkan, terutama dalam bidang peternakan dan perkebunan atau pertambakan. PIR atau Perkebunan Inti Rakyat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan gagasan ini. Namun apabila dalam PIR ada keterkaitan kepemilikan yang rumit, gagasan ini lebih praktis dan lebih masuk

akal, karena pabrik pengolah hasil perkebunan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada para petani yang sudah ada, bagaimana mereka bisa menghasilkan barang yang mutunya homogen dan cukup tinggi untuk diproses lebih lanjut oleh pabriknya. Contohnya adalah pabrik ikan kaleng Pronas yang tidak menangkap sendiri ikannya, tetapi membeli dari para nelayan yang dibimbingnya.

PUSAT INFORMASI DAN CLEARING HOUSE

Sering kita dengarkan keluhan, bahwa walaupun pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas dalam bentuk KIK, KMKP, Kredit Candak Kulak dan sebagainya, pada umumnya para pengusaha kecil yang berhak atas segala fasilitas ini tidak dapat memanfaatkannya, karena tidak mempunyai pengetahuan bagaimana mereka dapat memperoleh kredit ini.

Setelah mereka dapat memperoleh berbagai macam kredit, peningkatan produksinya akhirnya tidak dapat dijual dengan harga yang memadai, karena mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai kekuatan-kekuatan pasar yang ada, yang dapat menyerap produksinya dengan harga yang adil dan memadai.

Pengusaha besar, atau asosiasi-asosiasi pengusaha besar dan bank-bank dapat membentuk pusat-pusat informasi serta semacam "clearing house," yang mempertemukan para pengusaha kecil, menengah dan besar. Gagasan ini dalam berbagai kesempatan pernah dikemukakan oleh Prof. J. Panglaykim.

PENGEMBANGAN INDUSTRI TRADISIONAL DI DAERAH SEKITARNYA

Sebagai perwujudan dari kepekaan sosial terhadap daerah lingkungan sekitarnya, pengusaha besar atau gabungan dari pengusaha besar dan menengah dapat memilih industri tradisional di daerah sekitarnya untuk dibantu pengembangannya.

Dalam usahanya ini, industri yang dibantu tidak perlu, dan bahkan biasanya tidak ada keterkaitan dengan bidang usaha dari yang membantu, karena sifat pengusaha yang membantu, yang bergerak dalam bidang industri modern, sedangkan yang dibantu adalah dalam bidang industri tradisional.

Contoh konkret yang pernah dilakukan adalah oleh PT Konimex, Matari Advertising, dan LPPM, di mana Konimex menyediakan modal, LPPM

menyediakan manajemen dan Materi Advertising menyediakan disain produk dan pemasarannya.

Penyuluhan dilakukan dengan cara memesan barang-barang sambil mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh produsen. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, produsen dengan sendirinya akan terbina dalam perencanaan produksi, pembukuan, disain, dan kualitasnya. Fihak pengusaha yang membantu menggunakan kekuatan modalnya dengan cara membeli barang-barang produksi industri di Batur sambil mengatur. Proyek ini berhasil baik.

Sebelum ini, ada beberapa pengusaha kerajinan besi di Batur yang bangkrut justru setelah menang tender, karena salah membuat voorkalkulasi.

Sayang bahwa proyek-proyek semacam ini tidak diikuti oleh yang lain. Kasus ini dikemukakan sebagai contoh konkret dari upaya pengusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berbisnis dari industri tradisional di daerah sekitarnya tanpa pamrih sama sekali, karena sifat industri yang dibantu, yang sama sekali tidak ada kaitan bisnisnya dengan perusahaan-perusahaan yang membantu.

PERUSAHAAN BESAR SEBAGAI PENGAYOM DAN PENYALUR BANYAK PERUSAHAAN KECIL

Model ini banyak dilakukan di Jepang oleh Shogo Shosha, namun di Indonesia belum ada contohnya yang menonjol, walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa secara tidak diketahui oleh banyak orang, sudah ada yang menjalankannya.

Dasar pemikirannya adalah produksi dari barang dengan merek tertentu dan spesifikasi kualitas tertentu yang standar dan uniform, dan yang produksinya tidak dilakukan oleh satu pabrik besar, melainkan dilakukan oleh beratus-ratus rumah tangga atau kelompok-kelompok kecil. KEPADANYA DIBEKANNYAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONGNYA, dan seluruh produksi dibeli oleh perusahaan yang memasarkannya dengan seluruh jalur distribusi yang dimilikinya. Dengan demikian, perusahaan distribusi ini tidak perlu memiliki pabrik sendiri, karena produksi bisa dilakukan oleh para pengrajin kecil di rumahnya sendiri-sendiri. Konsumen dijamin kualitasnya dengan suplai bahan baku dan pengawasan kualitas yang ketat oleh distributor pemberi pekerjaan. Hubungan kerja seperti ini banyak kita lihat di Jepang, Hongkong, dan Taiwan.

MENGEMBANGKAN POTENSI WIRASWASTA MUDA

Kita sering mendengar adanya potensi pada beberapa pemuda untuk menjadi wiraswasta, tetapi terhambat karena tidak adanya modal equity. Walaupun dia memang mempunyai akses pada bank untuk memperoleh kredit, tetapi semua kredit hanya diberikan apabila pengusaha yang membutuhkannya dapat menyediakan sendiri sebagian dari modal yang dibutuhkan dalam bentuk modal sendiri atau modal equity.

Dasar pemikirannya adalah bahwa tidak ada pengusaha yang tidak menanggung risiko. Oleh karena itu, dengan proyek yang sudah dipersiapkan, direncanakan dan dihitung dengan matang, proyek bisa ditangani oleh wiraswasta muda yang tidak mempunyai modal equity. Modal equity disediakan oleh pengusaha besar dan modal pinjaman oleh bank. Wiraswasta diberi tanggung jawab manajemen dengan tingkat gaji yang sangat rendah, tetapi dengan bagian laba yang besar, misalnya 60%. Kepada wiraswasta muda yang akan diorbitkan ini diberikan opsi untuk membeli saham-saham dari perusahaan yang dipimpinnya. Uang yang dipakai untuk membeli saham ini adalah bagian labanya. Maka, bagian labanya tidak boleh dinikmati kecuali untuk membeli saham dari perusahaan yang dipimpinnya dalam rangka hak opsinya. Apabila perusahaan sudah menjadi miliknya, baik seluruhnya maupun sebagian besar (tergantung dari deal-nya semula), barulah dia bisa menikmati dividen.

Apabila dia berhasil memiliki perusahaan dengan konstruksi dan prosedur seperti ini, maka kecuali modal equity, pemilikan ini adalah hasil kerja keras dan hasil kemampuannya berusaha. Apabila dia gagal, pengusaha besar kehilangan modal equity-nya, dan dia kehilangan waktu dan nama baiknya.

Dengan demikian, sesuai dengan prinsip dasar yang berlaku di dalam dunia usaha, wiraswasta muda yang berpotensi ini juga diharuskan menanggung risiko. Karena modal tidak dimilikinya, risiko yang ditanggungnya adalah risiko kehilangan waktu, tenaga, dan nama baik sebagai pengusaha yang mampu.

KEGIATAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN OLEH PENGUSAHA

Sebagai perwujudan dari rasa peka dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya, beberapa pengusaha yang sukses dan kaya kadang-kadang merasa perlu memberikan baktinya dengan mendirikan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan/atau pendidikan.

Yayasan semacam ini bisa merupakan gabungan dari banyak pengusaha, sehingga bagi masing-masing pengusaha tidak terasa berat, sedangkan dana

yang dihimpun cukup besar. Yayasan ini bisa juga didirikan oleh satu pengusaha atau satu perusahaan tertentu yang besar. Contoh konkretnya adalah Yayasan Prasetya Mulya, yang sudah banyak kita kenal kegiatan-kegiatan-nya. Terutama daerah-daerah luar Jakarta perlu mencontoh kegiatan-kegiatan semacam ini.

Kiranya uraian ini masuk akal, tidak normatif belaka, tidak sloganistik. Setelah berjerih-payah memikirkan bentuk-bentuk konkret dari apa-apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha besar/kuat untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil/lemah yang berpotensi, tanpa terjerumus pada bentuk-bentuk yang tidak masuk akal, dan tidak yang bersifat "mau menangnya sendiri," semoga mendapat sambutan dari pengusaha besar/kuat dan yang kecil/lemah.

Pengertian Nasionalisme Menurut Bung Hatta*

H. Rosihan ANWAR

Diskusi panel itu bertema "Pemantapan Pengertian Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa dewasa ini demi Pengukuhan Eksistensi Negara Bangsa." Penyelenggaranya, Yayasan Prasetya Mulya dan Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia. Tujuan diskusi di antaranya ialah memperoleh kejelasan mengenai nasionalisme Indonesia sebagai pancaran dari Pancasila dan UUD 1945; memantapkan peran-serta dunia usaha dalam pembentukan bangsa dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tulisan ini dibuat setelah mendengarkan buah pikiran berharga dari pembicara terkemuka dan setelah menyimak isi makalah-makalah yang disajikan.

KERINDUAN AKAN NASIONALISME

Beberapa kutipan berbunyi sebagai berikut: "Walaupun konsep kebangsaan kita tidak mengenal bentuk-bentuk diskriminasi, tidak mengenal mayoritas-minoritas, tidak dilandasi oleh konotasi etnis, namun berkali-kali kita mengalami sikap serta tindakan yang rasialistis, menumbuhkan perasaan dan pengertian pembedaan antara "pribumi" dan "nonpribumi," antara asing dan asli. Masih lagi semua ini tidak jarang terkait dengan kenyataan, bahwa sebagian besar keturunan Cina itu hidup dari sektor ekonomi. Maka tiupan isu pribumi dan nonpribumi itu langsung saja dikaitkan dengan letupan isu kaya-miskin, walaupun dalam kenyataannya tidak semua keturunan Cina itu adalah kaya dan tidak semua yang lainnya adalah miskin, tidak semua keturunan Cina adalah berekonomi kuat dan tidak semua lainnya itu berekonomi lemah" (kata Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam).

*Karangan ini pernah dimuat dalam harian *Kompas*, 20 November 1984.

”Cita-cita kita bersama adalah sederhana tetapi agung: suatu masyarakat di mana sekalian golongan (kecuali golongan penjahat) dapat hidup rukun, mengembangkan diri tanpa merugikan golongan lain dan bahkan membantu, mendukung golongan-golongan lain, sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur” (kata Prof.Dr. Harsja W. Bachtiar).

”Dewasa ini terdapat semacam kerinduan akan nasionalisme. Keutuhan dan persatuan bangsa harus kita satukan pengertiannya, dengan lebih terwujudnya rasa senasib dan secita-cita, yang oleh karena itu harus ditumbuhkan melalui peningkatan solidaritas nasional, yang dapat dirasakan gemanya oleh semua orang” (kata Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Sekjen Golkar).

”Pengusaha dan wiraswasta sebenarnya tidak hanya dapat, bahkan seharusnya ikut berperan-serta secara aktif dalam usaha pembentukan bangsa. Mereka harus berusaha membuat ekonomi nasional Indonesia menjadi ’ekonomi pengetahuan’ (*knowledge economy*) melalui pembinaan dunia usaha, yang mereka pimpin dan miliki masing-masing” (kata Dr. Daoed Joesoef).

”Terutama bagi Indonesia yang masih dalam tahapan pembangunan, di mana pemerataan belum dapat dipaksakan oleh aparat pemerintah sepenuhnya secara memadai, dari usahawan dituntut untuk bersadar diri berinisiatif mengembangkan berbagai macam upaya pemerataan menurut kemampuannya masing-masing” (kata Drs. Kwik Kian Gie).

Demikianlah beberapa kutipan untuk memberikan sekedar ide tentang hal yang dipersoalkan. Dalam sanggahan dan diskusi tampil lagi satu baterai pembicara yang pintar-pintar; tidak semua buah pikiran mereka sempat saya catat. Teman-teman sejawat yang berbobot, seperti Jakob Oetama, Fikri Jufri, H. Machbub Djunaidi, tidak ketinggalan angkat bicara. Mendengar nama beberapa sarjana Barat disitir, seperti Ernest Renan, Otto Bauer, Durkheim, Max Weber dan lain sebagainya, sebenarnya saya ingin mengemukakan pandangan seorang putra Indonesia, yaitu Mohammad Hatta, tentang nasionalisme Indonesia.

KE ARAH INDONESIA MERDEKA

Buah pikiran Bung Hatta itu ialah KIM, singkatan dari Kearah Indonesia Merdeka, yang diterbitkannya dalam sebuah brosur tahun 1932, ketika dia memimpin Pendidikan Nasional Indonesia. Meskipun diutarakan lebih dari setengah abad yang silam, namun diletakkan dalam konteks keadaan sekarang, butir-butir pikiran Bung Hatta itu belum kehilangan aktualitas serta relevansinya. Beberapa kutipan adalah sebagai berikut:

"Kebangsaan ada bermacam-macam, menurut rupa dan warna golongan yang memajukannya. Ada kebangsaan "cap ningrat," ada kebangsaan "cap intelek" dan ada pula kebangsaan "cap rakyat." Riwayat dunia cukup memberi bukti, bahwa ketiga golongan ini ada senantiasa. ... Akan tetapi bukan kebangsaan ningrat dan bukan pula kebangsaan intelek yang dikehendaki oleh Pendidikan Nasional Indonesia, melainkan kebangsaan rakyat. Karena rakyat itu badan dan jiwa bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi-rendah derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik dan dengan rakyat itu kita akan turun. ... Kebangsaan itu haruslah dihindangi semangat rakyat, jadinya berdasar kerakyatan. Asas kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (*Recht*, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat, kalau ia beralasan kedaulatan rakyat."

Menurut Bung Hatta, yang kemudian menjadi salah satu Bapak Pendiri Republik Indonesia: "Demokrasi Barat yang dilahirkan oleh revolusi Perancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi yang memakai dasar, bahwa segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak, harus berlaku di bawah tanggung orang banyak juga. ... Kita tidak akan membawa marabahaya Barat itu (kapitalisme) ke tanah air kita. Sebab kedaulatan rakyat yang kita kemukakan harus berlainan dari keadaannya di Barat, harus bersendi kepada sifat kemasyarakatan (*gemeenschap*), yang menjadi tiang persekutuan kita semenjak zaman purbakala."

DEMOKRASI POLITIK DAN EKONOMI

"Sungguhpun kedaulatan rakyat yang dimajukan oleh Pendidikan Nasional Indonesia berupa baru, sebenarnya ia tidak asing bagi rakyat Indonesia, karena cita-cita ini tersusun di atas demokrasi tua yang ada di tanah air kita. ... Demokrasi asli yang ada di desa-desa di Indonesia mempunyai tiga sifat yang utama, yang harus dipakai sebagai sendi Perumahan Indonesia Merdeka.

Pertama: Cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang dan tidak luput karena tindisan yang pelbagai rupa. Rapat ialah tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarat dan mu-fakat tentang segala urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Di sini tampaklah dasar demokrasi, pemerintahan rakyat.

Kedua: Cita-cita massa protes yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Hak ini besar artinya terhadap pemerintahan despotisme atau autokrasi yang tersusun di atas pundak desa demokrasi. Dan demokrasi tidak dapat berlaku, kalau tak ada hak rakyat untuk mengadakan protes bersama. Dalam hak ini tercantum hak rakyat untuk merdeka bergerak dan merdeka berkumpul.

Ketiga: Cita-cita tolong-menolong. Sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektivitas. Kalau seseorang di desa hendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia tak perlu membayar tukang atau menggaji seorang kuli untuk menolong dia, melainkan ia ditolong bersama-sama oleh orang-orang desa. Di sini tersimpan dasar perekonomian berkoperasi. ... Inilah sendi tiga dari demokrasi asli di Indonesia.

Jika lingkungan dasarnya diluaskan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia menjadi dasar kerakyatan yang seluas-luasnya, yaitu kedaulatan rakyat seperti paham Pendidikan Nasional Indonesia. Di atas sendi yang pertama dan yang kedua dapat didirikan tiang-tiang politik dari demokrasi yang sebenarnya: satu pemerintahan negeri yang dilakukan oleh rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya atau badan-badan perwakilan, sedangkan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan senantiasa takluk kepada kemauan rakyat.

Untuk menyusun kemauan itu, rakyat mempunyai hak yang tidak boleh dihilangkan atau dibatalkan: hak merdeka bersuara, berserikat dan berkumpul. Di atas sendi yang ketiga dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang-orang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat banyak yang harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan."

Bung Hatta mengemukakan buah pikirannya tadi 52 tahun yang lalu. Para pengusaha dan wiraswasta yang ikut sebagai peserta diskusi panel itu, barangkali menganggap pikiran-pikiran Bung Hatta itu sudah ketinggalan zaman. Juga barangkali ada peserta yang menilai, pikiran Bung Hatta tidak pada tempatnya lagi dalam suatu *bureaucratic state* atau *beambtenstaat*. Tetapi mengingat sasaran diskusi panel adalah "mendapatkan pengertian yang jelas tentang konsep nasionalisme dan negara bangsa Indonesia serta peranan dunia usaha dan kewiraswastaan dalam usaha mewujudkan cita-cita negara dan bangsa," saya rasa tidak salah menaruh buah pikiran Bung Hatta sebagai bahan perbandingan dan pelengkap di hadapan para peserta diskusi dalam rangka menyambut peringatan 56 tahun Sumpah Pemuda.

Solidaritas Sosial dan Keterkaitan Ekonomi*

Hadi SOESASTRO

Kiai Haji Irfan sangat terpendang di desanya, di Jawa Tengah, yang sebagian besar penduduknya amat miskin. Ia kaya sekali dan tanah miliknya berhektar-hektar luasnya. Cerita mengenai Pak Haji ini dianggap menarik untuk diungkapkan dalam suatu diskusi panel baru-baru ini oleh Siswono Judo Husodo, tokoh pengusaha muda yang pernah tinggal di desa itu. Ikhwalnya, kekayaan Pak Haji yang demikian besar itu tidaklah membuatnya dibenci masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, keberadaan sang haji itu tampaknya di-"restui" oleh sekalian penduduk desanya. Bahkan di waktu lalu, ketika PKI gencar melansir *landreform*, Haji Irfan itu dilindungi oleh penduduk sekelilingnya.

Kasus Haji Irfan ini bisa saja dipakai untuk menunjukkan bahwa kesenjangan sosial ekonomi tidak selalu harus menimbulkan konflik. Apabila memang demikian halnya, maka masalahnya terletak pada pengertian mengenai kesenjangan itu. Karena kesenjangan itu menyangkut cita rasa, ia sebenarnya merupakan masalah persepsi. Kuantifikasi belaka tampaknya tidak memadai. Di India, misalnya, pembagian pendapatan antarkelompok masyarakat jauh lebih timpang daripada di Indonesia. Tetapi masalah kesenjangan ekonomi itu lebih banyak dipermasalahkan di Indonesia; mungkin karena lebih tampak.

Restu yang diterima Haji Irfan dari masyarakat sekelilingnya mungkin merupakan konsekuensi peranannya sebagai bapak *panutan*, seorang bapak pelindung yang tidak hanya memberikan naungan spiritual tetapi juga keuntungan material. Apabila demikian, dapatkah model ini diterapkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat kita dewasa ini, khususnya untuk menyerasikan hubungan antara pengusaha-pemilik modal dan lingkungannya?

*Karangan ini pernah dimuat di majalah *Tempo*, 17 November 1984 dengan judul "Haji Irfan, Gudang Garam, dan Dominasi Cina."

Contohnya ada, kata Kwik Kian Gie, pengusaha-*cum*-analisis itu: perusahaan rokok Gudang Garam merupakan usaha besar pribadi swasta -- *nota-bene* dari keturunan Cina -- yang kehadirannya juga direstui masyarakat sekelilingnya. Hal ini rupanya karena manajemen Gudang Garam memberikan berbagai pelayanan yang jauh melampaui apa yang lazimnya dilakukan suatu perusahaan. Falsafah yang mendasarinya, katanya, adalah membagi keuntungan, yang sebenarnya cuma manifestasi "keberuntungan."

Apa pun dasarnya, kasus-kasus di atas dilihat sebagai pencerminan dari apa yang disebut sebagai tanggung jawab sosial pengusaha. Setidaknya, dalam diskusi panel yang diselenggarakan oleh Yayasan Prasetya Mulya dan Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia, Kamis tanggal 8 November lalu di Gedung YPM di Cilandak, Jakarta Selatan, tampaknya disepakati arti penting solidaritas sosial tersebut. Malahan telah dikembangkan pemikiran-pemikiran yang menunjukkan mengapa pada tahapan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dewasa ini diperlukan suatu solidaritas baru. Dalam rangka ini, pengusaha dan wiraswasta patut diberi kedudukan yang layak, sebab mereka diperlukan sebagai ujung tombak menghadapi tantangan-tantangan berat di masa mendatang.

Solidaritas baru ini kiranya memang diperlukan untuk mengakhiri keadaan, yang di dalamnya pengusaha swasta cenderung dilihat dengan sebelah mata, sebagai kelompok yang dalam hidupnya hanya mengenal berbisnis serta mencari uang, dan tidak peka terhadap keadaan masyarakat sekelilingnya. Citra negatif mengenai pengusaha swasta ini cukup menahun, karena bersumber pada faktor-faktor ideologis, kultural, dan emosional, antara lain karena dunia usaha tampaknya tetap didominasi kelompok keturunan Cina.

Kalaupun juga disepakati bahwa hambatan-hambatan di atas dapat diatasi melalui keterlibatan sosial yang lebih besar dari para pengusaha dalam kehidupan masyarakat, cara keterlibatan itu sendiri masih perlu disepakati secara bersama. Sebab, esensi persoalannya adalah masalah membagi (redistribusi): mekanismenya, serta pola-pola yang digunakan untuk menghasilkan apa-apa yang kemudian dibagi itu.

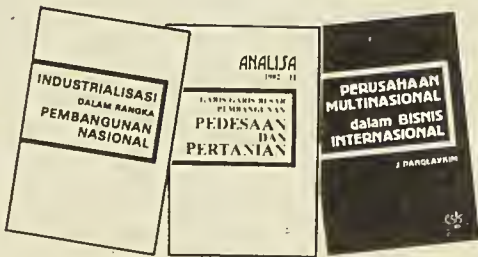
Mengenai mekanisme bisa dibedakan antara yang langsung (oleh perusahaan) dan yang tidak langsung (melalui pemerintah). Apabila sistem perpajakan berjalan dengan baik, maka masalah redistribusi secara adil diselenggarakan melalui anggaran pemerintah. Tanggung jawab sosial pengusaha dilaksanakan melalui pembayaran pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai program-program pemerintah. Cara yang lebih langsung, misalnya, adalah melalui sistem kekeluargaan dalam perusahaan, seperti yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Jepang. Pilihan mengenai

mekanisme ini pada akhirnya merupakan pilihan politis. Walaupun demikian, ia perlu memperhitungkan aspek efisiensinya.

Apa pun pilihan yang diambil, masih ada masalah lain yang perlu diputuskan: Apa yang harus dibagi? Secara sederhana, pilihannya dapat diibaratkan membagi kue atau membagi buah-buah hasil pohon. Dalam diskusi panel itu ada dinyatakan bahwa kita di Indonesia sudah terlanjur gandrung berbicara dalam bahasa membagi kue. Lalu masalahnya adalah kita lupa bahwa setelah dibagi kue itu pun habis. Lain halnya dengan membagi buah-buah hasil pohon; secara implisit ada persetujuan bahwa apabila pohon-pohon dibolehkan untuk menjadi semakin besar, dapat diharapkan semakin banyak buah yang dihasilkan, dan dengan demikian semakin banyak yang dapat dibagikan.

Diskusi panel sehari itu tidak memperoleh jawaban konklusif apakah falsafah pohon dan buahnya itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Ada kesan bahwa besar itu dianggap buruk, dan karenanya ada begitu banyak hambatan bagi perusahaan-perusahaan untuk berkembang. Tetapi bagaimana mungkin Gudang Garam dapat berkembang menjadi demikian besar, dan karenanya dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya, baik melalui pembayaran pajak maupun secara langsung melalui berbagai pelayanan sosial kepada masyarakat sekelilingnya? Mungkin memang karena keberuntungannya. Tidakkah sebenarnya keberhasilan Kiai Haji Irfan sebagai bapak pelindung itu dimungkinkan oleh kekayaannya yang besar?

Solidaritas baru, seperti yang dibahas dalam diskusi panel sehari itu, perlu melibatkan seluruh masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. Ia merupakan serangkaian *partnership* antara berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah. Ia menuntut kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha, dan bukannya persaingan yang saling mematikan. Dilihat dan diatur secara demikian, kerjasama antara penguasa dan pengusaha tidak perlu mempunyai arti dan akibat negatif bagi perkembangan bangsa dan negara. Malahan arti positif *partnership* ini merupakan inti tesis mengenai teori *developmental state* yang kini banyak diterapkan untuk menerangkan sebab-sebab keberhasilan beberapa negara melakukan transformasinya menuju industrialisasi.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/buletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta 10160, Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35